

TABLOID SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id

www.sinartani.co.id

Edisi 18 - 24 Juni 2025

No. 4091
Tahun LV



8 Erliana, Perempuan Tangguh
dari Tanah Laut

9 Hadir Benih Sawit Super
Tahan Ganoderma

10 Ayu Pertiwi, Mengawal MBG dari
Dapur sampai Tempat Sampah



www.tabloidsinartani.com



[tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com)



[@SinarTaniST](https://twitter.com/SinarTaniST)



[tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani)



[SINTA TV](https://www.youtube.com/SINTA_TV)



ADV RUBY


ADVANTA

- Warna menarik
- Hasil Tinggi
- Lebih toleran busuk batang



[id.advantaseeds](https://www.instagram.com/id.advantaseeds)



[Advanta Seeds Indonesia](https://www.facebook.com/AdvantaSeedsIndonesia)



[AdvantaSeedsID](https://www.youtube.com/AdvantaSeedsID)



id.advantaseeds.com



EDITORIAL

Keberlanjutan Sawit

Keberlanjutan (sustainable) menjadi isu besar yang terus digaungkan dunia, termasuk produk perkebunan sawit. Salah satu melalui ketentuan prinsip dan kriteria RSPO (*Roundtable and Sustainable Palm Oil*).

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, mau tidak mau Indonesia pun harus mengikuti arah isu tersebut. Pada awalnya, Indonesia, khususnya perusahaan sawit dalam negeri mengikuti ketentuan tersebut dalam pembangunan perkebunan sawit.

Namun karena disinyalir, lembaga RSPO banyak disetir kepentingan asing, khusus konsumen dan LSM asing, Indonesia akhirnya keluar dari keanggotaan RSPO. Pemerintah Indonesia kemudian membuat aturan main baru yakni ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Kemudian keluar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Pada tahun yang sama juga keluar kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut dengan terbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011.

Meski pemerintah telah membuat ketentuan ISPO, ternyata isu miring terhadap perkebunan sawit di dalam negeri masih tetap ada. Kampanye negatif tentang sawit, terus digaungkan negara-negara Barat. Mereka mengangkat mulai dari masalah deforestasi, HAM, pekerja anak dan kesehatan.

Disinyalir kampanye negatif tersebut memang sengaja digaungkan sebagai salah satu bentuk perang dagang terhadap minyak sawit. Perlu diketahui, minyak sawit selama ini memang menjadi pesaing utama minyak makan yang diproduksi negara-negara Eropa dan AS, seperti minyak kedele, minyak bunga matahari dan repseed.

Guna menangkalkan isu miring terhadap produk minyak sawit, pemerintah pun memperkuat kebijakan ISPO. Misalnya dengan menerbitkan Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang ISPO dan Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO).

Paling baru adalah dengan terbitnya Perpres No.16 Tahun 2025 tentang ISPO. Sebagai tindak lanjut, saat ini sedang proses penyusunan tiga Peraturan Menteri yakni Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM. Peraturan tersebut karena dalam Perpres terbaru, kewajiban ISPO tidak hanya untuk perkebunan sawit, tapi juga untuk industri hilir dan industri bioenergi sawit.

Jika melihat perjalanan ISPO, memang tak mudah bagi perusahaan sawit untuk mengikuti aturan ISPO. Salah satu yang menggajjal adalah masalah legalitas lahan dan perizinan. Ternyata masih terdapat kebun sawit yang belum memiliki legalitas (STDB, SHM, HGU). Selain itu, ada lahan perkebunan sawit seluas 3,2 juta ha kebun sawit yang terindikasi terbangun dalam kawasan hutan. Bahkan ada yang sudah HGU dan SHM.

Belum lagi masalah adanya konflik sosial antara perkebunan besar swasta/perkebunan besar nasional dengan masyarakat sekitar dan aksi penjarahan Tandan Buah Segar (TBS). Kondisi ini berdampak pada jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum.

Masalah-masalah tersebut membuat kebun sawit yang tersertifikasi masih relatif sedikit. Untuk perkebunan besar nasional seluas 390.834 ha (80 perusahaan), perkebunan besar swasta 5,39 juta ha (909 perusahaan) dan perkebunan rakyat hanya 88 pekebun dengan luas 98.717 ha.

Masih rendahnya lahan perkebunan yang tersertifikasi ISPO ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan. Semoga Perpres No. 16 Tahun 2025 bisa menjadi pemacu pelaksanaan ISPO.

SAUNG TANI

**Mentan : Negara tidak boleh kalah dengan mafia**

- Negara jangan dilindungi mafia

Dorong kemandirian pangan, Badan Pangan gandeng Pemda.

- Jangan cuma digandeng, tapi suruh berbuat

IPB kumpulkan pakar cari solusi masalah pupuk subsidi

- Solusinya harus jitu

**Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI****Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia**

Kasus keluarnya 11 ribu ton beras dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dalam satu hari menimbulkan kecurigaan ada permainan. Karena itu, pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan petani dan konsumen, termasuk dugaan permainan harga dan manipulasi stok pangan oleh mafia.

Kami (Kementerian Pertanian) bersama Satgas Pangan dari Mabes Polri tengah mendalami indikasi permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusi pangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta. Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun.

Mereka meminta maaf ke Satgas Pangan, tapi saya katakan tidak. Pemeriksaan harus tetap dilanjutkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal stok kita cukup, tidak kurang. Akhirnya kalau kita impor, yang terpukul adalah petani. Mereka bisa tidak semangat berproduksi. Saya tidak akan biarkan pihak-pihak yang melemahkan petani.

Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus dampingi. Jangan ada segelintir orang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia. Sekarang beras kita banyak, tapi ada yang mencoba-coba memainkan data, sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar.

Berdasarkan data Food Station Tjipinang dan penelusuran di lapangan ditemukan kecurigaan manipulasi data stok di PIBC. Harga beras di tingkat petani penggilingan turun. Itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen mengapa naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar.

Kedua adalah data dari Pasar Induk Beras Cipinang kita dapatkan ada yang tidak normal. Jika biasanya beras yang masuk dan keluar hanya sekitar 1.000-3.500 ton per hari, tetapi ada dalam satu hari keluar 11.410 ton. Ada ketidakwajaran beras yang keluar dalam satu hari.

Selama ini middleman (tengkulak) meraup keuntungan besar dibandingkan dengan pendapatan petani. Kita hitung-hitungan, petani itu hanya pendapatannya kira-kira Rp1,5 juta per bulan per orang. Jika selisih harga dari petani ke konsumen sebesar Rp 2.000, kemudian produksi kita 21 juta ton sampai Mei ini. Artinya apa? pendapatan middleman itu Rp 42 triliun.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, para petani harus terus dipenuhi kebutuhannya untuk mendongkrak produktivitas pertanian. Karena itu, pemerintah harus selalu hadir dan bersama petani. Misalnya, kuota pupuk ditambah, HPP (harga pembelian pemerintah) dinaikkan, dilakukan pendampingan, irigasi diperbaiki. Kita harus dampingi petani.

Saat ini produksi beras nasional mengalami lonjakan signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras mencapai 21,76 juta ton, meningkat 2,83 juta ton atau 14,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik Diolah

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter:** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo

Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS

Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Lahan Perkebunan Terancam Kritis, Ini Strategi Penyelamatnya

Lahan perkebunan di berbagai daerah mulai menunjukkan tanda-tanda kritis akibat kerusakan tanah. Tapi tenang, ada strategi jitu yang bisa jadi penyelamat demi lahan tetap subur dan panen melimpah!

Tanah itu seperti nadi bagi kehidupan tanaman. Ia menjadi tumpuan, penyimpan air, gudang nutrisi, sekaligus pengatur ritme pertumbuhan. Tapi sayangnya, kondisi tanah kita, khususnya di lahan-lahan perkebunan kian hari makin rentan rusak. Deforestasi, pengelolaan yang keliru, hingga pemakaian alat berat tanpa batas membuat tanah kehilangan "jiwa"-nya. Tanpa perlindungan, perlahan tapi pasti, tanah kita bisa berubah jadi tubuh kering yang tak lagi bisa memberi.

Kerusakan tanah di lahan perkebunan bukan dongeng lama yang terus diulang. Ini nyata. Banyak penyebabnya mulai dari cara konvensional mengelola lahan, membajak secara berlebihan, tak pernah mengembalikan bahan organik ke tanah, hingga meningkatnya aliran permukaan dan erosi.

Di Indonesia, komoditas perkebunan berkembang di dua jenis tanah yaitu tanah mineral dan tanah gambut, masing-masing punya tantangan sendiri.

Tanah mineral, terutama yang masam dan berada di lahan berlereng hingga bergunung, punya sejumlah kendala. Kapasitas tukar kation (KTK) yang rendah, kejenuhan basa (KB) yang sangat rendah, tingginya kandungan aluminium, dan rendahnya kadar bahan organik jadi faktor pembatas. Di musim kemarau, tanah jenis ini sulit menyimpan air dan sangat peka terhadap erosi.

Pada tanah mineral, kerusakan bisa muncul dalam tiga dimensi: fisika, kimia, dan biologi. Kerusakan fisik terlihat dari munculnya lapisan tipis kedap air (sealing/crusting) di permukaan, yang menurunkan daya serap tanah dan memicu pemadatan. Secara kimia, kerusakan ditandai dengan perubahan pH, kehilangan bahan organik, serta unsur hara yang terus berkurang. Sedangkan secara biologis, jumlah dan keragaman mikroorganisme tanah menurun drastis.

Sementara itu, tanah gambut jauh lebih sensitif. Kandungan hara di dalamnya rendah, produktivitas cepat turun, dan bila sudah kering akibat drainase, sulit untuk dikembalikan ke kondisi semula. Fenomena ini dikenal sebagai irreversible drying. Tanah gambut juga mengalami subsidensi, yaitu penurunan volume yang berdampak pada menurunnya permukaan lahan, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan.

Tanah gambut pun tak kalah mengkhawatirkan. Muka air tanah menurun, kandungan karbon menyusut, rasio C/N berubah, serat tanah berkurang, kesuburan anjlok, emisi gas rumah kaca (terutama CO₂) meningkat, dan erosi menjadi tak terhindarkan.

Kerusakan tanah di lahan perkebunan datang dari dua arah: ulah manusia dan kekuatan alam.

Faktor antropogenik meliputi eksploitasi lahan secara berlebihan, pemupukan yang tidak sesuai dosis dan kebutuhan tanaman, penggunaan pestisida dan herbisida



yang melampaui batas aman, serta konversi lahan hutan atau gambut secara sembrono. Penggunaan lahan miring tanpa konservasi dan ketidakseimbangan antara hara yang masuk dan keluar juga memperparah degradasi tanah.

Sementara faktor alami seperti curah hujan tinggi, topografi yang miring dan berbukit, serta karakteristik tanah yang peka terhadap erosi turut mempercepat proses kerusakan.

Strategi

Kerusakan tanah terjadi lebih cepat dibanding waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Maka dari itu, mencegah lebih bijak daripada mengobati.

Berikut strategi yang bisa diterapkan untuk menyelamatkan lahan perkebunan dari kehancuran jangka panjang:

1. Tutup permukaan tanah

Tanah yang terbuka rentan tererosi. Menutupnya dengan kanopi tanaman atau tanaman penutup tanah bisa mencegah kerusakan fisik permukaan tanah.

2. Pelihara kesuburan tanah secara berkelanjutan

Menjaga keseimbangan antara hara, air, dan bahan organik sangat penting. Stabilitas agregat dan aerasi tanah harus dipertahankan agar aktivitas mikroba tetap berlangsung.

3. Konservasi di lahan miring

Gunakan pola agroforestri, buat

terasering, dan kelola air hujan agar tidak menggerus tanah. Konservasi ini wajib hukumnya di daerah perbukitan.

4. Terapkan sistem polikultur

Pola tanam campuran jauh lebih baik dibanding monokultur. Ini menjaga keragaman dan mengurangi tekanan terhadap tanah.

5. Gunakan bahan organik dan biochar

Kembalikan sisa tanaman, pupuk kandang, dan biochar ke tanah untuk memperbaiki struktur, menambah cadangan karbon, dan meningkatkan daya simpan air serta hara.

6. Kelola tanah gambut dengan prinsip kehati-hatian

Sebelum membuka lahan gambut, lakukan kajian kesesuaian lahan. Pilih komoditas yang ramah lingkungan dan mampu menjaga struktur serta fungsi tanah gambut sebagai penyimpan karbon.

Mari selamatkan tanah perkebunan kita. Karena dari tanah yang sehatlah, kehidupan tumbuh dan kesejahteraan petani berkembang.

Penulis: Mugi Lestari

Penyuluh Pertanian Pusat

UU PANGAN Disorot

Berbagai elemen menyoroti UU Pangan. Seperti saat Bincang Pangan Sehat Lestari bertema "Arah Transformasi Sistem Pangan dalam RUU Pangan" Forum tersebut untuk memberikan masukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pangan yang kini pemerintah tengah bahas kembali.

RUU Sistem Pangan yang tengah digodok sendiri memuat sembilan pokok perubahan mendasar. Diantaranya adalah penguatan cadangan pangan nasional, kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan pangan, upaya penyelamatan pangan, hingga strategi pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan secara sistemik.

Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. Daniel Johan menegaskan, RUU Sistem Pangan harus benar-benar menjawab tantangan zaman, bukan sekadar revisi administratif. "Ketersediaan pangan hari ini tidak cukup hanya soal produksi.

Kita harus melihat dari akses, distribusi, nilai gizi, hingga keberlanjutan lingkungan. Negara harus hadir secara utuh untuk menjamin hak rakyat atas pangan sehat," katanya.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Jarot Indarto, Ph.D., mengaitkan urgensi transformasi pangan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Pangan menurutnya, adalah elemen strategis dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Transformasi sistem pangan harus menyatu dengan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan digitalisasi," ujarnya. Bahkan Jarot menilai, ketahanan pangan nasional hanya bisa dicapai bila ada sinergi kuat antar sektor dan pemanfaatan teknologi secara cerdas.

Sementara itu Puji Sumedi dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) menilai potensi besar dari pangan terbuang jarang mendapat perhatian.

Selama ini, masyarakat Kita terlalu banyak membuang makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi. "Ini bukan hanya pemborosan, tapi juga ironi di tengah ancaman kerawanan pangan. Kita perlu kebijakan yang mendorong redistribusi pangan berlebih ke masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Bukan hanya itu, Puji juga menyoroti pentingnya menggali kekayaan pangan lokal seperti tempe, umbi-umbian, dan hasil laut sebagai pilar ketahanan pangan yang murah, bergizi, dan berkelanjutan.

Ada beberapa poin krusial yang disorot adalah pentingnya mendukung produksi pangan dalam negeri. Dari mulai pemanfaatan pangan lokal, menekan susut dan sisa pangan melalui pendekatan pencegahan serta redistribusi pangan layak konsumsi, serta penguatan kelembagaan sebagai fondasi kebijakan yang berkelanjutan. **Echa**



AgriNews

ATURAN MAIN BARU SAWIT BERKELANJUTAN

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Ada aturan main baru dalam beleid tersebut yakni, sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tak lagi hanya di hulu, tapi juga di hilir. Siapakah pelaku usaha perkebunan sawit?

Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ratna Sariati menjelaskan, ISPO bukan sekadar label, melainkan sistem menyeluruh yang memastikan bahwa usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sertifikasi ISPO menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan kebun sawit telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut. Dasar hukum ISPO mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 2, 3, dan 62. Implementasinya dituangkan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020, yang kini diperbarui menjadi Perpres No. 16 Tahun 2025.

Perubahan ini mencakup perluasan ruang lingkup dari hulu ke hilir, termasuk sektor industri olahan dan bioenergi. Dengan demikian, ISPO tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk sektor hilir dan Kementerian ESDM untuk bioenergi.

"Penambahan ruang lingkup ini dibarengi dengan restrukturisasi

kelembagaan dan skema pembiayaan baru. Kini, pembiayaan ISPO untuk pekebun bisa difasilitasi oleh APBN, APBD, maupun Badan Pengelola Dana Perkebunan," ujar Ratna Saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema "Perpres No. 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan" yang juga Musyawarah Besar Forwatan di Jakarta, Rabu (4/6).

Catatan Ditjen Perkebunan hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 1.157 pelaku usaha telah memperoleh sertifikat ISPO dengan total lahan mencapai 6,2 juta ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 84 persen adalah perusahaan swasta, 9 persen BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat.

Kementerian Pertanian saat ini sedang menyusun pembaruan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 sebagai revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Permentan ini sebagai tindak lanjut Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Hilir pun Wajib ISPO

Dari sisi hilirisasi, Kementerian Perindustrian juga tengah menyiapkan skema sertifikasi ISPO untuk sektor hilir. Lila Harsyah

Bakhtiar, Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kemenperin, menyatakan, terminologi ISPO hilir masih fleksibel, namun prinsip dasarnya tetap sama: memastikan produk sawit olahan yang sampai ke tangan konsumen berasal dari sumber yang berkelanjutan. "Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, memberikan jaminan tertulis kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah berkelanjutan," kata Lila.

Saat ini terdapat 190 jenis produk hilir sawit, namun tidak semuanya akan disertifikasi. Fokus akan diberikan pada produk yang memiliki volume besar dan potensi pasar tinggi. Sertifikasi hilir akan memungkinkan pencantuman logo ISPO pada kemasan produk, sebagai penanda bahwa produk tersebut telah memenuhi prinsip keberlanjutan.

Berbeda dengan sertifikasi lain seperti SNI, ISPO hilir akan mensertifikasi proses produksinya, nantinya label atau logo akan ditempatkan pada produk akhir. Lila berharap, Juni 2025 ini, draf peraturan ISPO hilir akan dipublikasikan untuk konsultasi publik. Dengan skema yang disiapkan secara inklusif dan kolaboratif, pemerintah berharap sertifikasi ISPO hilir dapat diterapkan dengan efektif tanpa menjadi beban bagi pelaku usaha.

Sikap Pelaku Usaha

Untuk bisa memenuhi standar ISPO bagi perkebunan milik swasta, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Azis Hidayat mengatakan, banyak perusahaan sawit masih mengalami kendala legalitas lahan, yang menjadi hambatan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

"Belum lagi perusahaan besar, banyak yang belum punya HGU dan masih dalam proses. Ini jadi potensi besar untuk tidak bisa lulus ISPO," katanya. Namun, Azis menegaskan, GAPKI berkomitmen mencapai 100 persen ISPO. Sebagai bentuk komitmen, perusahaan melakukan penyesuaian dengan membentuk bidang perkebunan yang khusus menangani ISPO dan kemitraan dengan pekebun. Bahkan GAPKI telah memiliki program klinik ISPO di 15 provinsi.

"Komitmen termasuk organisasi GAPKI menyesuaikan karena khusus memang ingin mencapai 100 persen ISPO membentuk bidang perkebunan, kebetulan saya yang diberi tugas itu khusus menangani ISPO dan kemitraan dengan pekebun," ujar dia. Hingga Juni dari 1.177 anggota GAPKI, sebanyak 687 perusahaan atau sekitar 58 persen sudah bersertifikat ISPO. Total luas lahan bersertifikat mencapai 3,6 juta ha.

Kepala Pengembangan Program Solidaritas Indonesia, Edy Dwi Hartono menyampaikan dukungan implementasi Perpres No. 16 Tahun 2025 melalui penguatan kolaborasi multipihak dan peningkatan kesiapan petani, khususnya dalam praktik budidaya dan pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Dukungan tersebut tercermin dalam sejumlah aspek kebijakan. Misalnya, pada Pasal 4, Solidaritas berperan dalam memfasilitasi kelompok petani menuju sertifikasi melalui penguatan kelembagaan koperasi dan asosiasi lokal. Di Kalimantan Barat, Solidaritas menjalin kerja sama dengan Koperasi Credit Union Keling Kumang, asosiasi petani sawit, serta sejumlah mitra seperti SPKS.

Berbeda dengan perusahaan besar, Edy Dwi melihat untuk memenuhi standar ISPO bagi petani tidak mudah. Saat ini tingkat sertifikasi ISPO di kalangan petani rakyat masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen dari total 2,5 juta ha luas pekebun rakyat. "Ini menjadi tugas bersama yang harus kita tingkatkan. Tugas berat ini harus ditempuh agar petani tidak terpinggirkan dalam industri sawit di masa mendatang," kata Edy. **Yul**



Scan untuk mengetahui lebih tentang Perpres No. 16 Tahun 2025.



Perpres Terbit, Permentan Dikebut

Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

Dengan terbitnya regulasi baru tersebut, diharapkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bisa dipercepat.

Perlu diketahui, sertifikasi ISPO merupakan rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi sebagai bentuk pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

"Jadi sertifikasi ISPO menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan kebun sawit telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut," kata Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ratna Sariati saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) "Perpres No. 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (4/6).

Ratna mengatakan, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 60 hari sejak Perpres diundangkan pada 19 Maret 2025. Permentan ini dibutuhkan sebagai turunannya. Sebelumnya sudah ada Permentan No. 38 Tahun 2020 yang menjadi turunan dari Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Namun dengan adanya Perpres terbaru tersebut, Kementerian Pertanian pun harus merevisi Permentan. "Saat ini, kami sedang menyusun pembaruan dari Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia," kata Ratna.

Ratna mengingatkan, ISPO bukan sekadar label, melainkan sistem menyeluruh yang memastikan bahwa usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum ISPO mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 2, 3, dan 62. Implementasinya dituangkan dalam Perpres No. 44 Tahun 2020, yang

kini diperbarui menjadi Perpres No 16 Tahun 2025. Dasar hukum lainnya adalah Permentan No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Menurut Ratna, setidaknya ada tiga tujuan ISPO. Pertama, untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Kedua, meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. "Terakhir adalah meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca," ujarnya.

Inilah Bedanya

Ratna mengungkapkan, ada beberapa perbedaan mendasar dengan Perpres sebelumnya. Misalnya, ruang lingkup sertifikasi ISPO. Jika sebelumnya pemerintah hanya memberlakukan ISPO hulu atau kebun (Kementerian Pertanian), kini ruang juga pada industri hilir sawit (Kementerian Perindustrian), dan usaha bioenergi sawit (Kementerian ESDM). Diatur 3 kementerian tersebut.

Perubahan lainnya adalah adanya mandatori ketelusuran produk sawit. Artinya semua produk sawit dapat dipastikan ketelusuran keberlanjutannya. Dengan adanya Perpres terbaru, pemerintah akan membantu sistem informasi untuk melakukan *traceability* dari hulu hingga hilir.

Perubahan penting lainnya adalah adanya restrukturisasi Organisasi Komite ISPO yang tidak lagi di bawah Kementerian Pertanian, tapi 2 kementerian lain yang akan terlibat yakni Kementerian Industri dan Kementerian ESDM. Dengan demikian, ISPO tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan Kementerian Perindustrian untuk sektor hilir dan Kementerian ESDM untuk bioenergi.

"Komite ISPO nantinya terdiri dari menteri dan pimpinan lembaga terkait, asosiasi, pelaku usaha, akademisi dan pemantau independen. Anggota Komite



nantinya ditetapkan Presiden sesuai usulan Ketua Komite ISPO," tuturnya.

Pembiayaan Sertifikasi ISPO untuk pekebun rakyat dapat bersumber dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan, dulu BDPKS), APBN, APBD atau sumber biaya lainnya. Pembiayaan ini untuk satu siklus Sertifikasi ISPO yakni 5 tahun. "Sebetulnya biaya sertifikasi ISPO tak mahal. Tapi yang dirasakan mahal itu adalah pemenuhan persyaratannya, seperti adanya biaya kepemilikan dan biaya-biaya yang muncul lainnya, sehingga seolah-olah ada biaya tambahan yang cukup besar," ungkapnya.

Perbedaan lainnya, bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ISPO akan dikenakan

sanksi. Diantaranya berupa sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pemberhentian sementara usaha. "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan," katanya.

Kapan aturan baru ini berlaku? Ratna menjelaskan, untuk perusahaan perkebunan, pemberlakuan kewajiban sertifikasi ISPO berlaku sejak Perpres diundangkan. Sedangkan untuk pekebun berlaku setelah empat tahun Perpres diundangkan. Perpres No. 16 Tahun 2025 diterbitkan pada 19 Maret 2025. **Yul**

Insentif untuk Pekebun

Kementerian Pertanian ke depan akan merancang paket atau insentif (seperti premi) yang akan dimasukkan dalam revisi Permentan No. 38 Tahun 2020. Dalam revisi tersebut akan melibatkan berbagai pihak, seperti pekebun yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan pembeli seperti pengusaha sawit, sehingga ada win win solution.

Jika tahun sebelumnya, pemerintah hanya memberi insentif berupa audit, maka saat ini ada bantuan pelatihan ICS, STDB, biaya sertifikasi dan sarana produksi perkebunan. Dengan insentif tersebut diharapkan mampu mendorong pekebun untuk melakukan ISPO yang kini capaiannya hanya 1 persen. "Dalam upaya percepatan ISPO kami telah menyusun *roadmap* dan *mapping* wilayah kerja," katanya.

Hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 1.157 pelaku usaha telah memperoleh sertifikat ISPO dengan total lahan mencapai 6,2 juta ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 84 persen adalah perusahaan swasta, 9 persen BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat.

"Kalau dicermati lebih jauh pekebun yang sudah melakukan ISPO akan memperoleh banyak keuntungan. Dengan sertifikasi ISPO, pekebun patuh terhadap perundangan, melakukan praktik perkebunan yang baik, sehingga produktivitasnya akan meningkat," kata Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ratna Sariati. **Yul**

Nasib ISPO di Pasar Global

Kalangan pengusaha perkebunan yang bernaung dalam Gabungan Perusahaan Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Apalagi kini telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025. Namun, pengusaha berharap pemerintah bisa memperjuangkan sertifikat ISPO agar diterima pasar global.



Bagi kalangan pelaku usaha, khususnya perusahaan perkebunan sawit, kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap kebun sawit memenuhi prinsip dan kriteria berkelanjutan bukan hal yang baru. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2011, pemerintah telah menetapkan mandatori bagi perusahaan perkebunan untuk memenuhi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"GAPKI sebagai pelaku usaha selalu komitmen untuk taat dan patuh pada peraturan pemerintah, utamanya yang sudah terangkum dalam Standar Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan sudah mandatory sejak tahun 2011 hingga saat ini," kata Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), R. Azis Hidayat saat diskusi Perpres No.16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan, di Jakarta belum lama ini.

Bahkan menurut Azis, beberapa perusahaan, sudah mempunyai dan menerapkan Standar Internasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan seperti RSPO, ISCC dan NDPE. Bahkan sertifikasi ISPO terinspirasi dari RSPO juga, terkait masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan tata peraturan perundangan.

Azis berharap, sertifikasi ISPO juga bisa diakui di pasar global dan produk yang berasal dari kebun sawit yang sudah tersertifikasi ISPO mendapatkan harga premium. Apalagi di RSPO juga ada pengertian premium price. "Kalau RSPO sudah diakui pasar internasional, mereka nanti yang membuat standard sendiri. Bahkan perusahaan yang sudah ISPO bisa menjual produknya ke Eropa dengan harga premium," tuturnya.

Dengan demikian, pekebun yang mengantongi sertifikasi ISPO akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya mendapatkan nilai tambah yang tak kalah dengan RSPO. Dari sisi hulu, tata kelola perkebunan yang berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas kebun.

Untuk mewujudkan keberterimaan ISPO di pasar global, seperti yang diminta Pemerintah Jepang, Azis berharap pemerintah

sebaiknya segera membuat *Supply Chain Certification System* (SCCS) ISPO seperti pada RSPO dan MSPO yang sudah diakui dan diterima pasar global. Jadi, dapat digunakan untuk Sertifikasi ISPO Hilir, terutama prinsip ketertelusuran. "Saya juga mengusulkan agar Sertifikat ISPO diterbitkan dalam 2 bahasa Indonesia dan Inggris," katanya.

100 Persen ISPO

Azis menyampaikan, GAPKI berkomitmen mencapai 100 persen ISPO. Sebagai komitmen, GAPKI melakukan penyesuaian dengan membentuk bidang yang khusus menangani ISPO dan kemitraan pekebun. "Kebetulan saya yang diberi tugas khusus menangani ISPO dan kemitraan dengan pekebun," katanya.

Untuk mempercepat sertifikasi ISPO, GAPKI mempunyai program Klinik ISPO di 15 provinsi. GAPKI juga menyiapkan *coaching clinic* ISPO di cabang GAPKI, baik untuk anggota dan non anggota. "Kami memberikan fasilitasi pelatihan auditor ISPO bagi anggota bekerjasama

dengan lembaga pelatihan yang telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Bagi anggota GAPKI ada harga khusus," ujarnya.

Selain itu, GAPKI akan melanjutkan dan mengembangkan GISTA (GAPKI-ISPO Support Application) dan membuat KAFE (Konsultasi, Advokasi, Fasilitasi dan Edukasi) bagi anggota GAPKI. "Strategi percepatan ISPO pada prinsipnya didasarkan pada posisi GAPKI sebagai mitra strategis pemerintah. Kami selalu taat dan patuh terhadap regulasi. Jika ada kebijakan yang tidak berjalan atau kurang sesuai di lapangan, kami segera sampaikan masukan," kata Azis.

Azis berharap ada kebijakan *extra ordinary* dari Presiden, kementerian/ lembaga, Komite ISPO dan Pemda untuk segera menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi hambatan proses Sertifikasi ISPO. Untuk memotivasi pekebun yang akan wajib pada tahun 2029, ia mengusulkan, pemerintah membuat

program percepatan STDB Gratis, sertifikasi lahan, penyelesaian kebun sawit yang terbangun di kawasan hutan. Sertifikasi juga tidak ada pembatasan satu daur.

Data GAPKI menyebutkan, per Juni 2025 dari 1.177 anggota GAPKI, sebanyak 687 perusahaan atau sekitar 58 persen sudah bersertifikat ISPO. Total luas lahan bersertifikat mencapai 3,6 juta ha. Sedangkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, baru sekitar 100 ribu ha kebun rakyat yang memperoleh sertifikasi ISPO dari total 6,94 juta ha.

Hambatan utama yang dihadapi petani adalah persyaratan legalitas, karena belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Tanda Daftar Budidaya (SDGB). Untuk itu, ia mengusulkan, perlu ada Gerakan Akselerasi ISPO bagi pekebun sawit dengan target *quick win* dari Program PSR yang sudah dimulai sejak tahun 2016. "Saat ini sudah bisa dilanjutkan dengan proses Sertifikasi ISPO yang dananya sudah tersedia di BPDP untuk dana sarpras," kata Azis. **Yul**

Bentuk Pelaksana Harian Komite ISPO

Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Azis Hidayat mengusulkan agar dibentuk Pelaksana Harian Komite ISPO. Pasalnya, struktur organisasi saat ini belum cukup efektif untuk menangani aspek teknis sertifikasi ISPO.

Sebelumnya, Komite ISPO memiliki Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, dalam struktur yang baru, Dewan Pengarah ditiadakan, dan Ketua Komite ISPO dijabat langsung Menko Perekonomian.

"Karena itu, kami mengusulkan penunjukan Pelaksana Harian Komite ISPO. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi

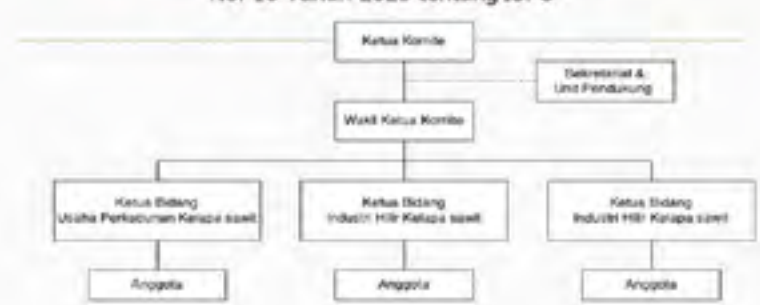
teknis dan administratif sehari-hari sehingga tujuan sertifikasi ISPO dapat tercapai lebih efektif," kata Azis.

Azis juga mengusulkan, perlu segera ditetapkan Unit Kerja Pendukung dan Sekretariat Komite ISPO, agar berfungsi untuk menjalankan beberapa kegiatan. Misalnya, tata kelola sistem sertifikasi ISPO, pusat data dan informasi, serta website ispo. Selain itu, kegiatan sosialisasi, advokasi, konsultasi dan penyelesaian perselisihan.

"Dengan adanya Sekretariat Komite ISPO bisa dilakukan monitoring, evaluasi terhadap Implementasi Sistem Sertifikasi ISPO, bahkan pengelolaan pengaduan," kata mantan Irjen Kementerian Pertanian tersebut. **Yul**

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE ISPO

Berdasarkan Amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 tentang ISPO



Industri Hilir dan Bioenergi Wajib ISPO

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025 mewajibkan industri minyak sawit dan bioenergi berbahan baku sawit memenuhi prinsip dan kriteria ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*). Seperti apa ISPO untuk industri hilir sawit?



Ada yang baru dalam Perpres tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan yang merupakan revisi Perpres No. 44 Tahun 2020. Jika sebelumnya pemerintah hanya memberlakukan ketentuan keberlanjutan pada perkebunan sawit (hulu), maka kini peraturan juga harus dipenuhi pelaku usaha di hilir yakni industri minyak sawit dan industri bioenergi sawit.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian kini tengah menyiapkan skema sertifikasi ISPO untuk sektor hilir. Lila Harsyah Bakhtiar, Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun draf peraturan ISPO hilir dan diharapkan dapat dipublikasikan untuk konsultasi publik pada Juni ini.

"Perubahan mendasar pada Perpres No. 16 Tahun 2025 adalah ruang lingkup yang sebelumnya hanya ISPO untuk kebun, sekarang diperluas hingga ke produk hilir dan bioenergi," kata Lila saat Diskusi Forum Wartawan Pertanian bertema Perpres No. 16 Tahun 2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurutnya, proses sertifikasi ISPO untuk industri hilir akan merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 Tahun 2020. Dengan skema yang disiapkan secara inklusif dan kolaboratif, pemerintah berharap sertifikasi ISPO hilir dapat diterapkan dengan efektif tanpa menjadi beban bagi pelaku usaha.

"Terminologi ISPO hilir masih fleksibel, namun prinsip dasarnya tetap sama yakni memastikan produk sawit olahan yang sampai ke tangan konsumen berasal dari sumber yang berkelanjutan," katanya.

Dalam aspek keberlanjutan, kata Lila, Kementerian Perindustrian pada prinsipnya hanya mentransformasikan atau meneruskan kegiatan keberlanjutan yang ada di kebun ke industri. Jadi produk yang dihasilkan berasal

dari sumber kebun yang sudah memenuhi prinsip dan kriteria berkelanjutan.

Saat ini Indonesia hanya mengekspor sekitar 10 persen dari CPO mentah, sementara sisanya dalam bentuk olahan. Karena itu, menjaga ketelusuran produk hilir menjadi sangat penting, mengingat pasar global kini semakin menuntut produk yang berkelanjutan.

"Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, memberikan jaminan tertulis kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah berkelanjutan," katanya. Apalagi kini konsumen semakin sadar akan *sustainability*, termasuk pada produk turunan kelapa sawit atau minyak sawit yang berkelanjutan.

Karena itu Lila menganggap, integrasi dan sinkronisasi prinsip, serta kriteria *sustainability* pada sektor industri kelapa sawitan dari hulu hingga hilir, menjadi aspek penting untuk mencapai tujuan ISPO yakni, pembentukan citra positif minyak sawit Indonesia, yang *sustainable* dan *traceable*.

Dengan adanya sertifikat ISPO, menurut Lila, perluasan akses pasar produk minyak sawit Indonesia, mengatasi kampanye negatif, menciptakan branding *Indonesian Palm Oil* yang kuat dan produsen akan mendapatkan nilai tambah lebih.

Lila juga mengungkapkan, dengan bahan baku minyak sawit mentah yang telah bersertifikat *sustainable* akan menghasilkan produk hilir yang otomatis juga berpredikat *sustainable*. Dengan catatan, sepanjang sistem rantai pasok dan sistem industri pengolahan telah memenuhi prinsip ketertelusuran tinggi, ramah lingkungan dan lestari berkelanjutan.

Saat ini terdapat 190 jenis produk hilir sawit, namun menurut Lila, tidak semuanya akan disertifikasi. Pemerintah fokus pada produk yang memiliki volume besar dan potensi pasar tinggi. "Nantinya sertifikasi hilir akan memungkinkan pencantuman logo ISPO pada kemasan produk, sebagai penanda bahwa produk tersebut telah memenuhi prinsip keberlanjutan,"

katanya.

Berbeda dengan sertifikasi lain seperti SNI, ISPO hilir akan mensertifikasi proses produksinya, namun label atau logo akan ditempatkan pada produk akhir. Sertifikasi ini berlandaskan pada tiga prinsip utama kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem dokumentasi yang baik, dan praktik usaha yang berkelanjutan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (UN SDGs).

Mengenai kondisi sertifikat ISPO saat ini, Lila menegaskan, diperlukan upaya pengakuan ISPO pada negara atau perusahaan konsumen minyak sawit asal Indonesia, untuk dapat memperkuat akses pemasaran minyak sawit Indonesia. Diperlukan

juga pembentukan sistem rantai pasok ISPO sepanjang rantai nilai kebun, pabrik hulu, pabrik hilir dan retail. "Termasuk juga pihak independen terakreditasi yang akan memverifikasi klaim produk bersertifikat ISPO," katanya.

Belajar dari MSPO dan RSPO, Lila mengatakan, lembaga itu telah memiliki sistem rantai pasok bersertifikat. Bahkan unit sertifikasi MSPO dan RSPO dapat menerapkan sistem yang menunjukkan klaim dan pihak Independen Terakreditasi (LS).

"Sistem ini dapat memverifikasi pelaksanaan prinsip MSPO/RSPO, sehingga keberterimaan pasar produk bersertifikat MSPO dan RSPO menjadi meningkat," ujarnya. Bagaimana dengan ISPO? **Yul**

Model Dasar Penyusunan Prinsip ISPO Hilir



Dalam menyusun prinsip ISPO hilir, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan model sertifikasi yang mengacu pada sistem *mass balance*. Model *mass balance* ini memungkinkan pencampuran bahan baku CPO *non-certified* dengan CPO *certified*. Dengan maksimal pada batas yang disepakati maksimal 30%.

"Model ini cenderung dipilih industri pengolahan karena lebih fleksibel, menyesuaikan *requirement* konsumen atau *buyer*. Jadi masih membolehkan pencampuran bahan baku *non-certified* dengan *certified*, dengan *threshold* tertentu, namun tetap dalam batas tertentu dan pengawasan yang ketat," kata Lila Harsyah Bakhtiar, Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian.

Untuk keseimbangan massa ini, Lila mengakui, membutuhkan sistem pencatatan yang ketat. Karena itu, pihaknya akan mengadopsi beberapa norma dari standar internasional seperti RSPO, ISCC, dan MSPO.

Model lainnya adalah segregasi. Model ini, tidak memungkinkan pencampuran bahan baku CPO *non-certified* dengan CPO *certified*. Artinya seluruh produk yang diolah harus berbahan baku yang sudah mendapatkan sertifikat. Jika beralih ke yang tidak ada sertifikatnya, maka perlu dilakukan pencucian menyeluruh.

"Model ini umumnya digunakan industri hilir yang produk akhirnya masih milik sendiri, atau masih milik group sendiri, atau pesanan industri tertentu. Model ini menjamin ketertelusuran dan keberlanjutan bahan baku CPO yang tersertifikasi untuk menghasilkan produk akhir," tuturnya. **Yul**

Erliana, Perempuan Tangguh dari Tanah Laut

Di tengah geliat modernisasi pertanian, Erliana dari Desa Padang Luas tampil sebagai figur inspiratif. Ia bukan sekadar petani, tetapi juga penyuluh dan motor penggerak kesejahteraan petani muda di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Dengan latar belakang sebagai penyuluh pertanian swadaya, Erliana tak hanya bekerja secara teknis di lapangan, tapi juga merangkul, mengorganisasi, dan memimpin komunitas pertanian agar tetap bertahan dan berkembang.

Perannya mencakup berbagai organisasi strategis. Sejak 2023, ia menjabat sebagai Bendahara Klaster Kurau Bungas. Lalu pada 2024 bergabung dalam Brigade Pangan Tunas Sukses Baimbai, serta memimpin Koperasi Desa Merah Putih yang tengah dalam tahap finalisasi pendirian.

Dibalik jajaran jabatannya, tersimpan visi besar yaitu meningkatkan indeks pertanaman padi (IP) dari 100 ke 200, demi produktivitas panen dan kesejahteraan petani. "Bertani bukan sekadar menanam dan panen, ini soal membangun bisnis pertanian yang berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai petani Erliana tak kenal lelah, ia terus melakukan berbagai kegiatan seperti monitoring tahap-tahap penting budidaya mulai dari penanaman, pertumbuhan tanaman, OPT, hingga pengaturan irigasi. "Saya selalu berada di lapangan saat pagi hari, memeriksa batang muda, memastikan air cukup, sekaligus memberi edukasi langsung ke kelompok tani," ungkapnya.

Melalui Brigade Pangan Tunas Sukses Baimbai, yang berisikan kelompok millennial yang mengelola 200 hektar sawah dengan sistem modern, Erliana mendorong transformasi pertanian, didukung mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. "Mesin olah tanah dan panen itu sangat membantu, mempercepat proses dan mengurangi risiko kerja fisik," katanya.

Meski begitu, Erlina mengakui,

tantangan dalam budidaya padi tak terhindarkan. Hama keong, tata kelola air yang tak stabil, dan pintu irigasi yang belum berfungsi maksimal. "Hama keong itu *killer*. Batang muda habis dimakan," ujarnya mengungkapkan isi hatinya.

Mengatasi hama tersebut, ia dan tim pun mengatasi dengan pemberian pestisida, pengaturan pola tanam, dan percepatan waktu tanam agar tidak terdampak musim ekstrem.

Klaster Kurau Bungas

Klaster Kurau Bungas berdiri Juni 2023 yang terdiri dari 13 pemuda desa. Awalnya mereka menanam padi 8 ha. Kini, luasnya telah mengganda menjadi 16 ha pada 2024. Sebagai bentuk apresiasi dan upaya membantu pengembangan, klaster ini meraih berbagai prestasi seperti dana HK senilai Rp184 juta, bimbingan dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan, dan pemasaran produk unggulan, Beras Kurau.

"Beras Kurau kami buat dengan penuh kebanggaan. Ini bukti bahwa kita bisa hasilkan pangan berkualitas dari desa," tutur Erliana. Selain produksi, klaster ini juga menyediakan jasa penggilingan gabah dan pengolahan lahan untuk petani setempat.

Aktivitas rutinnya meliputi pertemuan bulanan untuk evaluasi, pencatatan administrasi keuangan, dan pengelolaan usaha bersama. budidaya padi unggul, penggilingan gabah, serta olah lahan. Semuanya dilakukan dengan manajemen yang profesional dan transparan.

Di luar sawah, Erliana gencar menyosialisasikan program Perisai BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk melindungi petani dari risiko kecelakaan kerja hingga santunan kematian. "Petani butuh jaminan, bukan hanya saat panen tetapi juga saat mereka bekerja keras di ladang," katanya.

Kendati Koperasi Merah Putih masih dalam proses notaris, Erliana bersama anggota optimistis bahwa

koperasi akan menjadi lumbung ekonomi petani. Anggota boleh menabung dan pinjam di koperasi untuk kebutuhan modal pertanian.

Untuk mendanai kegiatan, mereka mengandalkan dana swadaya anggota. Namun, Erliana sudah menyiapkan inisiatif strategis: "Kami sedang ajukan KUR dan membangun komunikasi dengan calon investor agar klaster makin sehat finansial," ungkapnya.

Di hadapan media setempat, ia menyuarakan harapan bagi sektor pertanian: "Kami ingin irigasi tertata, harga gabah dan beras sesuai harapan petani, jalan usaha tani layak, dan lahan pertanian tidak dialihfungsikan. Semua demi terwujudnya pertanian yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan."

Erliana pun tak segan menyinggung aspirasi besarnya yaitu menguatkan jejaring pemasaran gabah dan beras, memperjuangkan kebijakan pertanian yang adil, dan meningkatkan kesadaran nasional bahwa pangan adalah pondasi penting masa depan. "Kami ingin menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045, melalui langkah nyata di desa," tutupnya penuh keyakinan.

Apresiasi BPPSDMP

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti mengaku bangga atas peran aktif Erliana yang merupakan *Young Ambassador Agriculture Program* YEES Tahun 2025



karena telah terlibat aktif dalam Koperasi Merah Putih. Bahkan langkah ini menjadi bukti nyata kontribusi generasi muda dalam membangun sektor pertanian dari desa.

Kehadiran YAA dalam struktur kepemimpinan Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa pembinaan generasi muda pertanian telah membuahkan hasil. Bukan hanya itu, Erliana tidak hanya menjadi simbol semangat muda, tetapi juga membawa kapasitas manajerial yang kuat untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian sekaligus Direktur Program YEES, Muhammad Amin juga bangga atas keterlibatan Erliana sebagai salah satu motor penggerak komunitas muda di daerah Kalimantan Selatan. Kualitas yang sama juga dimiliki para YAA lainnya, sehingga ia terus mendorong para pemuda untuk ikut berperan aktif.

"Semua YAA merupakan pemuda yang memiliki kualitas yang mumpuni. Semoga Erliana menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya," katanya. Erliana menjadi contoh semangat generasi muda membangun pertanian. **Pusdiktan BPPSDMP**

Hadir Benih Sawit Super Tahan Ganoderma

Bibit sawit super terbaru hadir dengan ketahanan terhadap Ganoderma. Penyakit yang mematikan tersebut selama ini menghantui petani sawit. Dengan adanya benih super tersebut, petani mempunyai harapan baru untuk panen maksimal.

Di tengah keprihatinan panjang petani terhadap penyakit busuk pangkal batang akibat *Ganoderma boninense*, harapan baru tumbuh dari dunia riset perbenihan nasional. Tiga varietas bibit kelapa sawit unggul yang memiliki ketahanan tinggi terhadap jamur perusak ini resmi dilepas pemerintah. Bahkan siap ditanam di lahan-lahan endemik yang dikenal rawan gagal panen akibat infeksi bawah tanah tersebut.

"Ganoderma adalah tantangan abadi dalam industri kelapa sawit. Apa yang dilakukan tim riset nasional ini menunjukkan bahwa kita bisa menghasilkan benih unggul dalam waktu relatif singkat dengan pendekatan ilmiah yang presisi," ujar Direktur Perbenihan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ebi Rulianti, saat ditemui usai sidang pelepasan varietas.

Penyakit ini telah menjadi ancaman serius dan hampir seluruh perkebunan sawit di Indonesia berada dalam zona risiko. Karena itu, pengembangan bibit tahan penyakit menjadi keharusan untuk menjaga kelangsungan produksi dan keberlanjutan kebun sawit nasional.

Bibit unggul ini dikembangkan khusus untuk menjawab tantangan Ganoderma yang penyebarannya kian meluas, terutama di kawasan Sulawesi Barat dan sebagian wilayah Sumatera. Cahyo Wibowo, salah satu peneliti senior yang terlibat dalam pengembangan mengatakan, benih ini bukan hanya fokus pada produktivitas, tapi juga mengutamakan daya tahan terhadap infeksi bawah tanah.

"Serangan Ganoderma seringkali tidak terlihat hingga batang pohon tiba-tiba roboh. Solusi semacam ini tidak bisa lagi ditangani hanya dengan pengendalian di permukaan. Kita harus mulai dari akarnya, dari benih yang kita tanam," ujar Cahyo.

Dalam praktiknya, ungkap Cahyo, infeksi Ganoderma menyebabkan kerugian besar setiap tahunnya. Banyak petani kehilangan satu hingga dua batang per hektar setiap tahun akibat penyakit ini.

Bahkan dalam kasus berat, seluruh blok kebun bisa kehilangan daya produksi.

Mirisnya, upaya penanggulangan seperti pembongkaran batang, sterilisasi tanah, hingga replanting dini masih belum efektif mengatasi penyebaran jamur yang menyebar melalui akar dan tanah. "Menurunnya jumlah tanaman produktif per hektare akibat Ganoderma adalah peringatan keras. Kita tak bisa lagi bergantung pada metode lama. Inovasi seperti ini adalah bagian dari upaya membangun masa depan sawit yang berkelanjutan," tegasnya.

Pendekatan Baru

Dengan hadirnya benih unggul ini, pelaku industri kini memiliki pendekatan baru yang dimulai sejak awal tanam. Ketiga varietas tersebut adalah DxP Nirmala MRG, DxP Lestari MRG, dan DxP Sejahtera MRG dari Astra Agro Lestari (AAL). Ketiganya telah mendapat pengesahan dari Sidang Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada 16 Mei 2025 di Bogor.

Ketiga varietas ini bukan sekadar hasil persilangan genetik biasa. "Benih tersebut lahir dari proses panjang riset ilmiah berbasis teknologi genomik dan uji lapangan di zona-zona kritis, tempat penyakit busuk pangkal batang telah merontokkan harapan petani satu per satu," tutur Cahyo.

DxP Nirmala MRG dikenal sebagai varietas unggul yang menyeimbangkan dua kekuatan utama yakni, produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap Ganoderma. Dengan rasio bunga betina yang tinggi, berkisar antara 80–88%, varietas ini mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) dalam jumlah optimal.

Keunggulan lainnya, ketahanan tinggi terhadap Ganoderma berdasarkan uji lapangan di Sulawesi Barat dan Riau. Kemudian juga tidak menghasilkan buah kempet (buah tidak berkembang), rendemen minyak sawit stabil di atas rata-rata nasional, hingga adaptif di lahan dengan tingkat infeksi tinggi,



termasuk lahan pasca-rotasi atau replanting.

Petani yang menanam DxP Nirmala MRG melaporkan penurunan signifikan jumlah tanaman yang mati akibat busuk batang, yang secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas lahan. Bagi wilayah yang menghadapi tantangan agroklimat seperti kekeringan musiman atau tanah marginal, DxP Lestari MRG menjadi jawaban. "Varietas ini dirancang khusus dengan toleransi tinggi terhadap stres lingkungan dan performa stabil dalam kondisi tanah kurang ideal," kata Cahyo.

Keunggulan utamanya, rasio bunga betina tinggi (sekitar 75–85%), menghasilkan TBS yang berkualitas, termasuk daya tahan terhadap infeksi Ganoderma setara dengan varietas Nirmala MRG. Benih ini juga produksinya konsisten, meski dalam kondisi cuaca ekstrem atau curah hujan rendah. Bahkan potensi rendemen minyak mencapai 25–28% tergantung perawatan.

Sementara benih DxP Lestari MRG cocok untuk lahan yang selama ini dianggap tidak optimal. Dengan demikian memberikan peluang baru bagi ekspansi dan intensifikasi produksi sawit secara berkelanjutan.

Varietas ketiga, DxP Sejahtera

MRG, diciptakan dengan karakter unggul dalam keseragaman pertumbuhan dan panen lebih awal dibanding varietas lainnya. Bibit ini sangat direkomendasikan untuk petani plasma dan program replanting berskala besar, karena memudahkan manajemen panen dan pemeliharaan.

Keistimewaan varietas ini memiliki kemampuan beradaptasi sangat baik di zona merah Ganoderma, memiliki potensi panen awal di usia 24–26 bulan setelah tanam. Bibit ini juga memiliki, seragam secara morfologi, memudahkan perawatan dan panen massal, toleransi tinggi terhadap kondisi tergenang atau drainase buruk. Varietas ini juga menunjukkan daya tumbuh lebih cepat pada fase awal pembibitan dan pertumbuhan akar yang kuat, yang penting dalam menghadapi serangan patogen di tanah.

Penggunaan bibit tahan Ganoderma membuka harapan besar bagi masa depan perkebunan sawit nasional. Di tengah tren menurunnya produktivitas akibat infeksi patogen yang kian meluas, kehadiran varietas unggul ini menjadi angin segar bagi petani, pelaku industri, hingga para pengambil kebijakan yang selama ini terus bergulat mencari solusi menyeluruh. **Gsh/Yul**



Ayu Pertiwi, Mengawal MBG dari Dapur sampai Tempat Sampah

Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Dengan anggaran dan target yang sangat besar, program tersebut membutuhkan pengawasan ketat. Karena itu, setiap dapur MBG mendapat kawalan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ayu Pertiwi, menjadi Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Tanah Sareal, Kota Bogor. Bagi lulusan S1 Ekonomi Syariah IPB University dan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan, mendapat tugas menjadi bagian Unit SPPG merupakan amanah yang sangat besar.

Pasalnya, dalam Program MBG ini, unit yang berada dalam tanggung jawabnya harus mendistribusikan makan bergizi gratis ke 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor. Angka yang sangat besar. Apalagi pendistribusian pangan berlangsung setiap hari dan dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah. "Dapur MBG Kota Bogor melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," ungkap Ayu kepada Tabloid Sinar Tani.

Untuk Program MBG di kota Bogor, Badan Gizi Nasional menetapkan ada 4 SPPG. Setiap 1 SPPG melayani 3.000-3.500 porsi. Di Tanah Sareal. Uji coba Program MBG berlangsung sejak 18 November 2024. Sedangkan di lokasi lainnya baru mulai 6 Januari 2025.

Ayu bercerita, lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. "Dapur saya menjadi salah satu dapur percontohan Badan Gizi Nasional di Kota Bogor dan daerah Palmerah Jakarta Barat. Kenapa kami yang dipilih sebagai percontohan? Mungkin di wilayah Tanah Sareal Bogor angka siswanya banyak dan stunting juga cukup tinggi," ujar Ayu.

Tantangan SPPG

Bagi Ayu menjadi Kepala SPPG merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi dirinya yang lulusan ekonomi. Meski setiap menu makanan sudah ditentukan nilai gizinya, tapi dirinya yang bukan ahli gizi harus mengetahui juga tentang ilmu gizi. Bersyukur sebelum mendapat pelatihan terlebih dahulu.

Tantangan lainnya bagi Ayu adalah mengawal para pekerja SPPG. Pegawai Unit SPPG Tanah Sareal saat ini sebanyak 15 orang. Terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur.

"Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar dan merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Jadi tantangannya bagaimana kita harus merekrut orang-orang yang belum profesional dibidangnya," katanya.

Ayu mengungkapkan, para pekerja sudah mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda. "Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja," katanya.

Dalam pendistribusian makanan, Ayu menjelaskan, ada dua gelombang. Pertama, jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB. "Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Kalau pagi, kami mengirim untuk anak-anak



sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Setiap SPPG harus memikirkan waktu baiknya dalam memberikan makanan," tuturnya.

Tantangan kedua, Ayu mengakui adalah bagaimana setiap dapur harus membuat porsi makanan dalam jumlah yang cukup besar hingga 3.000 porsi setiap hari. Apalagi dalam menu tersebut harus lengkap ada sayur mayur, lauk pauk, protein nabati hewani dan buah-buahan.

"Dari menu tersebut, kita juga ada tantangannya karena anak-anak itu agak picky eater atau susah makan," ujarnya. Karena itu, setiap SPPG juga harus berfikir bagaimana menu MBG menarik. Sebab, jika tidak menarik, maka anak sekolah tidak akan dimakan. Dengan begitu tujuan kita tidak tercapai.

"Kita lebih menjaga kualitas makanan. Menurut saya selama ini makanan sudah layak terima, makanan sudah standar. Ada karbo, protein, serat dan buah. Menyuaikan lengkap," katanya. Tapi diakui, dengan adanya MBG ternyata tingkat kehadiran siswa juga makin baik.

Tantangan lainnya adalah memberikan makanan untuk Ibu hamil dan menyusui. Namun selama uji coba, tanggapan dari kalangan ibu-ibu cukup baik. "Sejak Februari sudah jalan, sejauh ini responnya baik, ibu hamil juga senang. Kita kasih terus makanan lengkap dan dikombinasikan dengan susu hamil.

Sebab, beberapa dari keluarga tidak mampu merasa senang mendapatkan susu hamil," katanya.

Limbah Makanan

Ayu melihat tantangan lain dari Program MBG adalah limbah makanan. Dalam pembagian makanan, ternyata tingkat food wasted (sisa makanan) yang cukup besar adalah anak-anak SMA, sedangkan anak-anak TK, SD dan SMP tidak terlalu banyak.

Di areal pembagian MBG di Tanah Sareal Bogor, di salah satu kecamatan dengan jumlah 16 sekolah SMA, Ayu mengatakan, ada satu sekolah yang paling banyak menerima MBG yakni sekitar 1.200 yang cukup banyak food wastednya sekolah SMA tersebut.

Belajar dari kasus tersebut, Ayu pun mengambil langkah yang cukup efektif untuk mengurangi sisa makanan. "Kenapa sisa makanan banyak di anak-anak SMA? Ternyata karena pada awal pemberian MBG, menu makanan kita tidak kasih sambal. Sekarang kita kasih hiasan untuk mempercantik tampilan makanan dengan cabe dan rasanya yang agak pedas mereka tertarik makannya," tuturnya.

Untuk limbah makan, Ayu mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan peternak lele dan bebek yang mengambil sampah limbah sisa makanan tersebut. Satu harapan Ayu, program ini terus berjalan untuk meningkatkan kualitas SDM kita. **Echa/Yul**

Embung KPS Muara, Solusi Konservasi Air untuk Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) Kementerian Pertanian telah memulai pembangunan embung penampung air untuk mendukung irigasi Kebun Pemeriksaan Substantif (KPS) PVT Muara. Pembangunan embung tersebut menjadi salah satu upaya mendukung proses pengujian varietas tanaman.

Embung ini dirancang seluas 500 meter persegi dan kedalaman 1 meter, dengan kapasitas tampung mencapai 487 meter kubik.

Pembangunan embung ini merupakan respon atas meningkatnya beban layanan sertifikat hak perlindungan varietas tanaman di KPS Muara, yang membutuhkan solusi konservasi air yang efektif.

Saat peletakan batu pertama, Kepala Pusat PVTTP, Dr. Leli Nuryati, Minggu (15/6) mengatakan, pembangunan embung ini sangat penting untuk mendukung pengujian varietas tanaman di KPS Muara. Sebab, ketersediaan air yang stabil adalah kunci agar pengujian varietas tanaman bisa berjalan sepanjang tahun tanpa terganggu musim kemarau.

Saat ini, pembangunan embung

sudah 40% dan akan memasuki masa pengerjaan utamanya yaitu pemasangan geomembran serta kirmir sisi embung. Proyek ini ditargetkan rampung dan mulai difungsikan pada awal Juli 2025.

Dengan adanya pembangunan embung ini, Leli berharap dapat meningkatkan kualitas pengujian dan pemeriksaan varietas dan mendukung ketersediaan pangan di Indonesia. "Kami sangat menghargai dukungan semua pihak. Embung ini adalah tonggak penting bagi keberlanjutan sistem perlindungan varietas tanaman di Indonesia," kata Leli.

Seperti diketahui Pusat PVTTP mempunyai tiga kebun percobaan yakni, Manoko (Lembang), Muara (Bogor) dan Mojosari (Mojokerto). Untuk meningkatkan pemeriksaan PVT, Pusat PVT meningkatkan fasilitas yang ada di kebun percobaan.



Misalnya, pihaknya juga telah menempatkan pemeriksa di lokasi kebun. "Jadi tidak ada pemeriksa PVT berada di pusat, sekarang semua ada di kebun sesuai tugas dan fungsi untuk pemeriksaan uji BUSS," ujarnya,

Pusat PVTTP lanjut Leli, juga melakukan penguatan sarana dan prasarana lainnya di tiga kebun percobaan. Misalnya, membangun IoT yang bisa memantau kegiatan di kebun, baik melalui komputer maupun handphone.

Sebagai gambaran, tahapan proses permohonan hak PVT meliputi pemeriksaan dokumen, pengumuman permohonan Hak PVT selama 6 bulan, pemeriksaan

substantif maksimal 24 bulan, kemudian proses penerbitan sertifikat atau penolakan yang akan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

PVT merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola Kementerian Pertanian. Berbeda dengan jenis HKI lain yang dikelola Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI. Secara prinsip, memang sama-sama kekayaan intelektual. Hanya saja PVT obyeknya adalah tanaman yang dalam aturan internasional tidak boleh dipatenkan. Pada Tahun 2025, PPVTTP telah melayani 1.134 permohonan PVT dan menerbitkan 778 sertifikasi hak PVT.

Humas PPVTTP



TANI SUKSES

Ini Resep Cuan dari Brigade Pangan Tani Muda Sukses

Kelompok Tani Muda Sukses di Karang Buah, Kalimantan Selatan, berhasil bukukan omset Rp310 juta lewat padi unggul dan alsintan.



Di tengah bentang alam yang tenang dan subur di Desa Karang Buah, Kecamatan Belawang, Kalimantan Selatan, berdiri sekelompok anak muda dengan semangat yang membara. Mereka menamai diri sebagai Tani Muda Sukses, sebuah kelompok tani yang tak hanya menanam padi, tapi juga menumbuhkan harapan baru di tengah desa yang dulu nyaris terlupakan.

Dengan anggota sebanyak 15 orang dan lahan seluas 193 hektare, kelompok ini telah membuktikan bahwa pertanian bisa menjadi jalan hidup yang menjanjikan. Di bawah

binaan Brigade Pangan, Tani Muda Sukses mengusung cara bertani yang modern, efisien, dan berdaya saing. Mereka mengandalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor roda 4, traktor roda 2 rotary, bajak, rice transplanter, combine harvester besar, hingga pompa air berukuran 4 inch.

"Kalau dulu panen bisa dua minggu, sekarang tiga hari saja bisa selesai. Alsintan sangat membantu mempercepat semua proses," ungkap Catur Sasmito, Manajer Brigade Pangan yang memimpin langsung jalannya kegiatan kelompok ini.

Efisiensi menjadi kunci utama keberhasilan mereka. Dengan Indeks Pertanaman (IP) 100, proses tanam dan panen berlangsung tepat waktu, lahan terjaga produktivitasnya, dan

hasil meningkat signifikan. Tak heran jika kelompok ini mampu membukukan omset sebesar Rp310.650.000, dengan pendapatan bersih mencapai Rp40 juta hanya dalam satu musim tanam.

Namun capaian itu tak datang dengan sendirinya. Para anggota aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan dari berbagai pihak. Mereka diajarkan cara menggunakan alsintan secara efisien, teknik budidaya seperti sistem jajar legowo, hingga manajemen air dan waktu tanam. Semuanya dijalani dengan tekad dan antusiasme tinggi.

"Kami ini generasi baru, harus berani berubah. Alsintan itu bukan sekadar alat, tapi sahabat kami di lapangan," ujar Arman, salah satu anggota muda yang kini

mahir mengoperasikan combine harvester.

Lebih dari sekadar usaha tani, Tani Muda Sukses menjadi simbol regenerasi petani di tengah krisis minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Mereka membuktikan bahwa pertanian bisa menjadi ladang masa depan yang menjanjikan, asal dikelola dengan cara yang tepat.

Tak hanya dirasakan oleh para anggotanya, dampak kehadiran kelompok ini juga menyebar ke masyarakat sekitar. Pengetahuan meningkat, produksi melimpah, dan pendapatan petani desa ikut terdongkrak. Warga yang sebelumnya enggan kembali ke sawah, kini mulai melirik kembali tanah sebagai sumber penghidupan.

Lahan-lahan yang dulu tertidur kini bergeliat. Di antara alur irigasi dan deru mesin traktor, tumbuh semangat baru yang memancarkan optimisme. Dari Karang Buah, suara perubahan bergema. Mereka menanam padi, memanen keberanian, dan menabur harapan untuk masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah.

"Ini baru permulaan, Kami percaya, petani muda bisa jadi tulang punggung pangan nasional," ucap Catur menutup percakapan.

Nattasya/Gsh



Lembaga Petani, Nafas PSR Berkelanjutan

Sudah siapkah Indonesia menghadapi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang sebentar lagi diberlakukan? Gagasan mengenai EUDR sudah ada sejak tahun 2013 setelah final report "The Impact European Union Consumption on Deforestation".

Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, Komisi Uni Eropa sangat gencar dalam membahas regulasi produk impor yang mengandung unsur deforestasi hutan. Parlemen Uni Eropa akhirnya menyetujui naskah EUDR pada 22 Oktober 2022 dan mulai diberlakukan untuk perusahaan besar pada Desember 2025 serta Juli 2026 untuk perusahaan kecil menengah.

Berdasarkan data FAO (2023), setiap tahunnya Indonesia mengekspor CPO dan produk turunannya ke Uni Eropa senilai 3,6 juta USD. Mengingat hal tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak tahun 2017.

Tujuan dilaksanakannya program PSR diantaranya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, meningkatkan daya saing, dan untuk menjawab tantangan global terkait isu pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian program ini sekaligus bertujuan untuk menertibkan lahan sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan. Lebih lanjut, solusi penertiban lahan sawit rakyat yang berada di kawasan hutan diatur dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja. Lambatnya penyelesaian sawit dalam kawasan hutan tidak terlepas dari kurang sinkronnya peta lahan pertanian dengan peta dasar dari ATR/BPN.

Pusat Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian (didanai oleh BPD PKS yang sekarang menjadi BPDP) pernah melakukan kajian akselerasi program PSR di berbagai sentra kelapa sawit di Indonesia. Salah satu temuan kajian adalah peran kelembagaan petani dalam percepatan dan keberlanjutan program PSR. Bentuk kelembagaan petani tersebut antara lain koperasi, kelompok tani, maupun gabungan kelompok tani.

Peran lembaga petani sangat penting karena mulai dari pengajuan dokumen hingga pelaksanaan replanting dikoordinasikan melalui lembaga petani ini. Pada aspek percepatan program PSR, lembaga petani berperan dalam proses administrasi dan seleksi internal terhadap anggota yang akan mengajukan program, termasuk didalamnya dapat memilah lahan sawit yang masih berada dalam kawasan hutan.

Selanjutnya, peran lembaga petani melaksanakan replanting dan melakukan pemantauan serta pembinaan kepada anggotanya sampai tanam sawit hasil replanting menjadi tanaman menghasilkan.

Namun pada kenyataannya, beberapa lembaga petani hanya dibentuk untuk menerima program PSR dan setelah itu tidak aktif lagi. Pengurus lembaga petani masih banyak yang tidak melek teknologi, padahal proses pengajuan program PSR saat ini sudah berbasis elektronik.

Oleh:

Aldho Riski Irawan, S.Si

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian IPB)

Dr Nia Kurniawati Hidayat, S.P., M.Si

(Dosen Ilmu Ekonomi Pertanian IPB)

Kondisi yang seperti ini memunculkan pihak ketiga (calo) yang mengakibatkan ketidak efektifan sistem. Biaya pihak ketiga ini dibebankan kepada petani yang akan mendaftar sebagai calon penerima program.

Meskipun demikian, masih banyak juga ditemui lembaga petani yang memang proaktif menjalankan program PSR dengan cara menyerap hasil panen petani, menjual sarana produksi pertanian terutama pupuk, serta membuka akses pembiayaan kepada anggotanya. Setelah dikaji lebih lanjut dengan menggunakan analisis dekomposisi, didapatkan fakta bahwa lembaga petani yang proaktif berimplikasi pada peningkatan daya saing petani dalam hal harga, produksi dan pendapatan.

Petani mendapatkan kejelasan harga serta harga yang lebih tinggi sekitar Rp50,00-Rp200,00 per kilo tandan buah segar (TBS) dibandingkan jika menjual ke tengkulak. Petani kelapa sawit yang bergabung dalam lembaga petani yang proaktif mampu memproduksi TBS yang lebih tinggi 11,7 ton per hektare per tahun dibandingkan petani yang tergabung dalam lembaga yang tidak proaktif.

Hal ini disebabkan karena petani lebih mudah dalam mengakses pupuk, obat, dan tenaga kerja. Selain itu, lembaga petani juga aktif dalam memberikan sosialisasi terkait praktik budidaya kelapa

sawit yang baik (*good agricultural practices*). Dengan demikian pada setiap satu hektare lahan sawit, petani yang bergabung dalam lembaga petani yang proaktif akan memiliki pendapatan per tahun 23 juta lebih tinggi dibandingkan petani lainnya.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi, petani akan mengalokasikan input yang lebih banyak untuk meningkatkan produksinya. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga petani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap percepatan dan keberlanjutan program PSR.

Lantas, apakah pemerintah Indonesia tetap melanjutkan program PSR dengan segala permasalahan mendasar di tingkat lembaga petani? Pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan sawit dalam kawasan hutan melalui sinergitas lembaga petani, pemerintah daerah, dan ATR/BPN untuk pendataan lahan petani by name by address.

Selain itu pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Kementerian Pertanian seyogianya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan replanting perkebunan kelapa sawit rakyat. Lembaga petani penerima program PSR didorong untuk bermitra dengan perusahaan sehingga memotong rantai distribusi yang tidak efektif.

Penguatan lembaga petani melalui suntikan modal ataupun mempermudah akses kredit yang akan digunakan untuk usaha penjualan sarana produksi pertanian ke petani kelapa sawit. Serta yang terakhir adalah pembinaan lembaga petani sebagai bekal transfer ilmu kepada petani sawit terkait praktik budidaya kelapa sawit yang baik.

ISPO: Antara Niat Baik dan Taring yang Tumpul

Bayangkan sebuah aturan yang lahir dari semangat menjaga hutan, melindungi pekerja, dan memperbaiki citra sawit Indonesia di mata dunia. Tapi begitu turun ke tanah, yang terasa justru seperti nasihat tanpa kuasa. Itulah kira-kira gambaran dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia alias ISPO.

Sejak dideklarasikan lebih dari satu dekade lalu, ISPO digadagadag sebagai jawaban atas stigma sawit: dari deforestasi, pelanggaran HAM, hingga ketimpangan ekonomi. Tujuannya mulia, membawa industri sawit ke arah yang lebih hijau dan berkeadilan. Perpres 16/2025 hadir dengan janji menyempurnakan

kekurangan versi sebelumnya.

Sertifikasi kini bersifat wajib, tak peduli pelaku besar atau kecil. Pemerintah juga menjanjikan penguatan sistem pengawasan, pembinaan, serta sanksi administratif bagi pelanggar. Tapi, seperti biasa, niat baik di pusat belum tentu kuat di lapangan.

Mari kita tengok pekebun kecil. Mereka adalah tulang punggung sawit nasional, tapi seringkali dipinggirkan. Apakah mereka siap mengikuti sertifikasi ISPO? Faktanya, sebagian besar bahkan tak tahu apa itu ISPO.

Biaya sertifikasi? Tak terjangkau. Prosedurnya? Ribet. Pendampingan? Minim dan tambal sulam. Maka wajar jika sebagian petani melihat ISPO bukan sebagai jalan keluar, tapi beban baru yang mengintai dari

balik kebijakan.

Lalu, bagaimana dengan kredibilitasnya? Di pasar global, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) masih jadi primadona. ISPO, meski di bawah naungan pemerintah belum punya daya tawar yang kuat.

Kurang transparan, belum ada mekanisme pengaduan yang terbuka, dan kurang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah. Padahal ini era keterbukaan, bukan zamannya kebijakan disusun di balik tirai rapat.

Dan satu hal yang terus jadi ganjalan: pengawasan. Jika sertifikasi hanya jadi stempel, tanpa ada verifikasi dan penindakan yang tegas, maka ISPO cuma jadi simbol. Perusahaan bisa pamer sertifikat, tapi di lapangan tetap langgar aturan. Dan celaknya, mereka yang

Oleh: **Memed Gunawan**

benar-benar ingin berubah justru tenggelam di bawah bayang-bayang para pelanggar yang tak tersentuh.

Saya tidak sedang menyalahkan semangat di balik Perpres 16/2025. Justru, ini langkah penting yang tak boleh dibiarkan mandek. Tapi jika regulasi tak dibarengi keberpihakan pada petani, transparansi dalam pengawasan, dan komitmen pasar untuk menghargai sawit berkelanjutan, maka ISPO akan gagal menjawab tantangan zaman.

Perpres ini sudah diteken. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan ia berjalan, bukan hanya berjalan di atas kertas, tapi menyentuh tanah dan menggugah hati.



Agroeduwisata Anggur ala Petani Pangandaran

Anggur kini menjadi komoditas yang memberikan daya tarik tersendiri bagi petani, seiring dengan meningkatnya permintaan dan harganya yang menggiurkan. Salah satunya, Kelompok Tani (poktan) Taruna Tani Mekar Bayu, Dusun Cihideung, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat yang sukses beragribisnis anggur. Bahkan mereka kini mengembangkan agrowisata anggur.

Jika melihat kebutuhan buah anggur dalam negeri, maka harus diakui sampai saat ini sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri. Tahun 2022 produksi anggur hanya 13.515 ton, jauh dibandingkan impor yang mencapai lebih dari 100.000 ton dengan nilai 300 juta dollar AS setiap tahun.

Namun sejak 2020, produksi anggur nasional terus meningkat dengan ditemukan berbagai varietas anggur daerah tropika basah, terutama di dataran rendah. Ini tentu saja merupakan berita yang sangat menggembirakan. Dengan meningkatnya produksi anggur dalam negeri, sudah pasti akan mengurangi impor.

Kabupaten Pangandaran adalah daerah wisata level nasional, bahkan internasional yang kini sedang giat menggenjot produksi pangan, termasuk komoditas hortikultura seperti anggur. Produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar Pangandaran, bahkan dari mancanegara.

Ketua Poktan Taruna Tani Mekar Bayu, Tahmo Cahyono mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, selain padi, petani juga membudidayakan anggur untuk menambah pendapatan. Saat ini Poktan ini menanam lebih dari 10 varietas anggur. Diantaranya, Sansekerta, Portugis Dream, Jupiter, Ghospi, Black Jumbo, Cihaurbeuti, dan lain-lain.

Berdasarkan warna dan bentuk buah, ada anggur yang hijau bulat, hijau panjang, merah bulat, merah panjang, hitam bulat, dan hitam panjang. Diantara semuanya, yang paling manis adalah anggur hitam panjang, merah bulat, dan hijau panjang. "Anggur ini ternyata paling disukai pasar. Selain rasanya manis, juga kadar airnya rendah, petani sering menyebutnya sebagai anggur kering," kata Tahmo.

Tahmo bercerita, bibit tanaman umumnya mereka perbanyak sendiri dengan cara steknya dari pohon induk. Kemudian ditanam di polybag dengan media tanah



dicampur pupuk kandang, kompos jerami, dan sekam padi.

Memiliki anggota 385 orang dengan komoditas utama padi, Poktan Taruna Tani Mekar Bayu menanam anggur di lahan kering. Poktan ini masih mengandalkan air hujan sebagai satu-satunya sumber pengairan. Beberapa petani ada juga yang mengairi tanaman secara manual dari saluran irigasi cacing menggunakan selang plastik.

Data menyebutkan, rata-rata curah hujan tahunan Kabupaten Pangandaran sekitar 2250 mm/tahun, termasuk peralihan antara daerah kering dan basah. Kondisi ini termasuk ideal untuk pertumbuhan tanaman anggur di dataran rendah. Paling ideal untuk tanaman anggur sebetulnya daerah dengan kelembaban rendah atau curah hujan dibawah 2.000 mm/tahun.

Tips Budidaya Anggur

Petani Pangandaran nampaknya sudah faham pertanian ramah lingkungan. Menurut Tahmo, dalam budidaya anggur petani penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah. Mereka menggunakan kompos jerami, pupuk kandang, humus bambu, dan arang sekam padi serta pupuk organik cair (POC) yang berasal dari urine kelinci yang difermentasi.

Namun demikian, Poktan ini juga masih menggunakan pupuk kimia dalam jumlah terbatas, yaitu pupuk NPK 30 gram yang dilarutkan



dalam 20 liter air dan disiramkan untuk setiap 4 pohon. "Komposisi pupuknya masing-masing 1 bagian dicampur hingga merata, lalu dimasukan lubang tanam yang berukuran 50 x 60 x 50 centimeter persegi, lalu disirami dengan larutan pupuk kimia," tuturnya.

Dalam budidaya anggur petani juga menggunakan rumah kaca UV, meski sangat sederhana dan murah. Rumah kaca menggunakan tiang dan rangka dari bambu serta alas untuk tanaman merambat (sekitar 1,5 meter di bawah atap). Petani menggunakan belahan bambu selebar 3 cm yang dianyam berukuran sekitar 20 x 20 cm.

Petani juga menggunakan plastik UV yang harganya murah untuk melindungi tanaman dari terjangan air hujan secara langsung. Selain itu hampir tidak ada lagi peralatan pertanian yang digunakan, kecuali gunting tanaman untuk keperluan *pruning* (pemangkasan) dan panen.

Tahmo sendiri memiliki 4 unit rumah kaca berukuran 20 x 2 meter, ada yang 4 x 5 meter, ukuran 12 x 18 meter dan 14 x 18 meter, tergantung ketersediaan lahan. "Saya membuat pembibitan anggur sendiri dengan cara stek dari pohon induk ditanam di media tanah dengan tambahan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah di dalam polybag kapasitas 3 kg," ungkapnya.

Setelah bibit tanaman berumur 2-3 bulan atau setinggi tanaman 1-2 meter, Tahmo menjelaskan, perlu dilakukan *transplanting* ke lubang tanam di rumah kaca UV dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 meter atau populasi sekitar 1.600 pohon/ha. Kemudian saat tanaman berumur 7 bulan, lakukan *pruning* terhadap seluruh daun tanaman.

Tahmo menjelaskan, jika tanaman berumur 9-11 bulan setelah *transplanting*, maka buah anggur siap panen. Setiap pohon umumnya mampu menghasilkan 7-10 kg buah

anggur segar atau produktivitas sekitar 11-16 ton/ha. Bahkan untuk varietas Jupiter dengan pengelolaan yang maksimal tanaman mampu menghasilkan 30-40 kg/pohon atau sekitar 48-64 ton/ha.

Soal hama, Tahmo mengakui, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) selalu ada, meski tidak terlalu serius. Misalnya, embun tepung dan flex hitam di daun tanaman dan hama kutu kebul. Namun petani sudah melaksanakan konsep pengendalian hama terpadu (PHT), seperti penggunaan fungisida nabati yakni ekstrak bawang putih atau buah maja. "Bila serangan melampaui ambang batas, baru petani menggunakan pestisida kimia, tapi secara terbatas," ujarnya.

Tahmo dan teman-temannya memiliki cara unik untuk budidaya, panen dan memasarkan hasil panen anggur. Petani Pangandaran sangat sadar bahwa kampung halamannya termasuk kota wisata handal di level nasional, bahkan internasional. Mereka membangun agroeduwisata anggur yang merupakan perpaduan antara wisata, pendidikan, dan budidaya pertanian anggur.

Dengan cara seperti ini ternyata antusiasme masyarakat, pelajar, mahasiswa termasuk wisatawan sangat luar biasa. Mereka berbondong-bondong datang ke *farm* Poktan Taruna Tani Mekar Bayu untuk belajar budidaya, sekaligus memetik sendiri dan menikmati anggur yang menggoda selera dan membuat konsumen ketagihan untuk datang kembali.

Bahkan pengunjung sama sekali tidak keberatan merogoh dompetnya untuk bayar seharga Rp 100.000 untuk setiap kg anggur yang dipetik. Ternyata anggur ranum matang membuat Tahmo dan kawan-kawan tersenyum senang.

D. Nursyamsi, I. Sariati, dan A. Susilawati/Yul.

Raja Ampat Menangis

Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai surga bawah laut dunia, kini tengah menangis. Kerakusan manusia telah membuat keindahannya mulai pudar. Entah siapa yang memberikan ijin, tambang nikel telah merusak ekowisata di wilayah Indonesia Timur tersebut

Laporan terbaru Greenpeace mengungkap, lebih dari 500 hektar (ha) hutan dan vegetasi khas di tiga pulau kecil, Pulau Gag, Kawe, dan Manuran telah dirambah untuk kepentingan tambang. Ironisnya, ketiga wilayah itu termasuk zona konservasi laut dan darat berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dan pesisir.

Sementara itu laporan dari Auriga Nusantara, sebuah organisasi lingkungan independen, mengungkap luas lahan tambang di kawasan ini bertambah sekitar 494 ha hanya dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Angka yang meningkat tajam dibanding lima tahun sebelumnya. Kini, total izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat mencapai lebih dari 22.420 hektar.

Ekspansi ini bukan tanpa dampak. Tak hanya merusak daratan, pengerukan dan pembukaan lahan juga menyebabkan sedimentasi yang mencemari perairan pesisir. Lumpur yang terbawa hujan merendam terumbu karang, membunuh plankton, menghambat fotosintesis, dan menghancurkan rumah alami ribuan spesies laut.

Lautnya sebening kristal, terumbu karangnya menari bersama arus, dan biota lautnya seperti lukisan hidup dari tangan Tuhan. Tapi di balik keelokan Raja Ampat, permata biru dari Timur Indonesia itu, kini menganga ancaman yang tak bisa dianggap remeh, tambang nikel.

Terumbu karang yang selama ini jadi benteng alami perairan tropis pun kini perlahan memutih dan mati. Lebih memprihatinkan, limbah tambang juga mengubah kadar keasaman air laut. Perubahan ini telah menyebabkan gangguan serius pada kehidupan organisme laut, memicu kematian biota, serta mengancam kelangsungan ekosistem bawah laut yang selama ini jadi pusat keanekaragaman hayati global.

Ironisnya, tambang nikel sering digembar-gemborkan sebagai pilar ekonomi hijau karena menjadi bahan



baku baterai kendaraan listrik. Tapi di Raja Ampat, yang terjadi justru sebaliknya: kerusakan masif dan permanen. Ancaman ekologis itu bukan sekadar cerita pesimis.

Stop Tambang Nikel

Desakan agar aktivitas pertambangan dihentikan pun terus menguat, datang dari aktivis lingkungan, peneliti, warga lokal, hingga wisatawan mancanegara. Mereka bersatu dalam satu suara yaitu lindungi Raja Ampat.

"Selamatkan Raja Ampat dari kerusakan oleh pertambangan nikel. Stop pertambangan nikel sekarang juga," tegas Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, menyuarakan kegelisahannya.

Baginya, yang selama ini dikenal sebagai pakar kelautan dan Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, persoalan ini bukan sekadar tarik-menarik antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Ini adalah bencana lingkungan berskala global yang bisa menggerus warisan hayati dunia.

"Raja Ampat bukan hanya basis kehidupan Indonesia, tetapi juga dunia," ucapnya. "Ini bukan soal nasionalisme sempit. Ini soal tanggung jawab terhadap bumi. Kalau Raja Ampat rusak, dunia ikut rugi," tambah Prof. Rokhmin dengan nada getir.

Prof. Rokhmin mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi seluruh izin tambang di kawasan tersebut dan mengambil tindakan nyata sebelum semuanya terlambat. "Kalau kita gagal menjaga Raja Ampat, kita gagal menjaga masa depan bumi," tegas Rokhmin yang juga pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu mantan Menteri

Kelautan dan Perikanan lainnya, Susi Pudjiastuti juga mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi lingkungan di Raja Ampat yang semakin terancam akibat ekspansi pertambangan nikel dan industrialisasi di sektor hilir.

Melalui unggahan di media sosial, Susi secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut, demi menjaga kelestarian ekosistem laut dan mempertahankan mata pencaharian masyarakat nelayan setempat.

Jangan Berpikir Jangka Pendek

Desakan juga datang dari pakar ekonomi lingkungan yang meminta pemerintah untuk segera menetapkan status ekologis Raja Ampat guna mencegah kerusakan permanen akibat aktivitas tambang. Aceng Hidayat, pakar ekonomi sumber daya lingkungan dari IPB University menegaskan, pemerintah harus segera memilih apakah Raja Ampat akan dikelola sebagai kawasan ekologis atau nonekologis.

"Industri tambang adalah kegiatan ekonomi jangka pendek yang ekstraktif dan merusak lingkungan. Sementara ekowisata memberikan keuntungan berkelanjutan jika dikelola dengan baik," ujar Aceng.

Ia menambahkan, meskipun tambang memberikan keuntungan finansial besar dalam waktu singkat, pemerintah harus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan negara, bukan hanya perusahaan. "Raja Ampat adalah warisan dunia. Jika dikelola sebagai destinasi ekowisata, keuntungan jangka panjangnya jauh lebih besar. Namun, infrastruktur dan edukasi masyarakat lokal harus dipersiapkan dengan matang," jelasnya.

Kritik juga ditujukan kepada

koordinasi antar-kementerian. Aceng Hidayat meminta Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang selaras sebelum mengeluarkan izin tambang. "Harapannya, informasi harus simetris antara semua pihak agar tidak ada simpang siur data. Proyek tambang harus melalui prosedur ketat, termasuk AMDAL," tegasnya.

Sementara itu, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), menyoroti tumpang tindih regulasi yang memicu polemik pertambangan di pulau kecil, termasuk Raja Ampat. "UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jelas melarang pertambangan di pulau kecil. Namun, masih ada pemberian hak khusus yang bertentangan dengan aturan ini," tegas Huda.

Ia menegaskan, larangan pertambangan di pulau kecil telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Solusinya bukan merevisi UU, tetapi menegakkan aturan yang ada. Aktivitas tambang di Pulau Gag dan wilayah lain di Raja Ampat jelas melanggar hukum," tambah Huda.

Gerakan penolakan tambang di Raja Ampat semakin menguat. Masyarakat lokal, aktivis lingkungan, dan pegiat ekowisata menuntut pemerintah memprioritaskan pelestarian alam. "Raja Ampat adalah mutiara biodiversitas. Jika dirusak, kita kehilangan warisan dunia yang tak tergantikan," kata salah satu pegiat lingkungan.

Dengan potensi ekowisata yang jauh lebih berkelanjutan, pilihan kini ada di tangan pemerintah: mengejar keuntungan sesaat atau menjaga keindahan Raja Ampat untuk generasi mendatang. Jangan hanya demi perut sebagian orang, justru mengorbankan bangsa Indonesia. Raja Ampat pun menangis. **Gsh/Yul**

Ironi Raja Ampat, Cermin Kegagalan Esensi Keberlanjutan

Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai simbol megabiodiversitas laut dunia dengan lebih dari 500 spesies karang dan ribuan jenis ikan, kini menghadapi ironi pahit. Wilayah yang semestinya dilindungi ini justru menjadi sasaran eksploitasi tambang nikel, memicu gejolak serius dan krisis kepercayaan terhadap arah pembangunan nasional.

Dr Nimmi Zulfainarni, akademisi IPB University dari Sekolah Bisnis mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, laporan mengenai alih fungsi lahan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, dan sejumlah kawasan lain di Raja Ampat telah menimbulkan konflik ekologis, keresahan masyarakat adat, dan mempertanyakan pemaknaan pembangunan.

"Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, maka kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam

memahami esensi keberlanjutan," ujar Dr Nimmi.

Menurut dia, masalah utama bukan terletak pada ada atau tidaknya izin pertambangan, melainkan pada absennya pendekatan kebijakan berbasis valuasi ekonomi yang komprehensif. Valuasi ekonomi tidak hanya tentang keuntungan maksimum, tetapi juga tentang menjaga kelestarian sumber daya alam.

"Lebih dari sekadar mengonversi nilai lingkungan menjadi angka rupiah, valuasi ekonomi merupakan upaya ilmiah dan normatif untuk menempatkan lingkungan di pusat pertimbangan kebijakan," ucapnya.



mengizinkan aktivitas ekstraktif di kawasan yang sama.

Studi empiris menunjukkan bahwa setiap hektare terumbu karang di Raja Ampat mampu menghasilkan miliaran rupiah per tahun melalui pariwisata bahari, tangkapan perikanan, dan jasa ekosistem lainnya.

"Kehilangan nilai-nilai ini akibat sedimentasi, kerusakan karang, dan polusi air dari aktivitas tambang tidak hanya menggerus basis ekonomi lokal, tetapi juga merusak integritas ekologis yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup generasi mendatang," ungkapnya.

Ia menyoroti praktik pertambangan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Baginya, praktik tersebut juga memperlihatkan lemahnya instrumen tata kelola dan penegakan prinsip kehati-hatian. "Banyak izin tambang di masa lalu dikeluarkan tanpa Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang partisipatif dan ilmiah, bahkan sebelum kajian valuasi ekonomi yang kredibel," tegasnya seperti dikutip laman IPB.ac.id.

Dalam konteks kebijakan publik, Dr Nimmi menekankan bahwa valuasi ekonomi seharusnya menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari setiap kebijakan. **Yul**

Selain itu, pendekatan valuasi menyeluruh, yang meliputi nilai penggunaan langsung (perikanan, pariwisata), nilai tidak langsung (perlindungan pantai, penyerap karbon), dan nilai eksistensi, akan menunjukkan bahwa ekosistem Raja Ampat memiliki nilai ekonomi jangka panjang yang jauh melampaui royalti sesaat dari ekstraksi nikel.

"Alih fungsi ekosistem di wilayah pesisir Raja Ampat memperlihatkan kontradiksi kebijakan yang mencolok," jelasnya. Di satu sisi, pemerintah mempromosikan ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan. Tapi di sisi lain justru

AGRITIPS

Lima Jurus Sakti Rawat Sawit Muda

Merawat kelapa sawit muda ibarat membesarkan anak, tidak bisa dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa perhatian. Perlu kesabaran, kedisiplinan, dan teknik yang tepat agar pertumbuhannya seragam, sehat, dan kuat. Jika salah langkah sejak awal, hasilnya pun bisa tidak merata: ada pohon yang tumbuh tinggi, ada pula yang kerdil, berdaun pucat, dan tertinggal jauh dari yang lain.



Langkah pertama yang penting adalah memilih bibit unggul. Petani kerap tergoda bibit murah yang tidak jelas asal-usulnya, padahal bibit unggul bersertifikat seperti DxP (Dura x Pisifera) memiliki daya tumbuh yang tinggi, tahan terhadap penyakit, dan lebih berpotensi menghasilkan tandan buah yang maksimal. Bibit yang baik menjadi fondasi bagi keberhasilan tanaman di masa depan.

Berikutnya adalah cara menanam yang benar. Lubang tanam sebaiknya dibuat dengan

ukuran ideal, yaitu 60 x 60 x 60 sentimeter. Jarak antar tanaman perlu diatur secara seragam, umumnya 9 x 9 x 9 meter dalam pola segitiga sama sisi, agar seluruh tanaman memperoleh cahaya matahari secara merata dan tidak saling berebut ruang tumbuh.

Setelah tanaman ditanam, pemupukan menjadi tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Kelapa sawit muda membutuhkan asupan nutrisi yang tepat sesuai umur tanaman. Pupuk NPK digunakan secara teratur, dan jika pH tanah terlalu asam, bisa ditambahkan dolomit untuk menetralkan keasaman.

Pemupukan yang teratur dapat menunjang pertumbuhan akar dan daun dengan optimal.

Selanjutnya, gulma harus dikendalikan sejak dini. Gulma merupakan pesaing dalam menyerap unsur hara dari tanah. Jika tidak dibasmi, pertumbuhan sawit akan terganggu. Penyiangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan herbisida yang tepat dan aman bagi tanaman utama.

Terakhir, penting untuk melakukan pemantauan hama dan penyakit secara rutin. Serangan ganoderma, ulat api, dan kumbang

tanduk dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemeriksaan berkala dan tindakan cepat sangat dibutuhkan agar tidak menyebar luas dan menyebabkan kerusakan besar.

Dengan lima jurus sakti ini, pemilihan bibit unggul, penanaman yang tepat, pemupukan sesuai umur, pengendalian gulma, dan pengawasan terhadap hama, petani dapat memastikan bahwa kelapa sawit muda tumbuh seragam dan sehat. Perawatan yang konsisten sejak awal akan berbuah pada panen yang maksimal di kemudian hari. **Gsh**

**H. Prabowo Subianto**

KETUA DEWAN PEMBINA DPN HKTI

**Manimbang Kahariady**

SEKRETARIS JENDERAL DPN HKTI

**H. Fadli Zon**

KETUA UMUM DPN HKTI

**Andi Iwan Aras**

BENDAHARA UMUM DPN HKTI

Kongres TANI IX MUNAS X HKTI

"HKTI MEWUJUDKAN PERTANIAN MODERN DAN STRUKTUR PERDESAAN MAJU"

LAHIRNYA PEMIMPIN BARU

**AGENDA ACARA**

- Munas X HKTI
- Kongres Tani IX
- Tani Fest
- Saresehan Tani
- Business Matching
- Gerakan Pangan Murah (GPM)



PRASETYA ADHI P : 0813-8126-2208

CATAT TANGGALNYA !

24-26 JUNI 2025

Auditorium Kementerian
Pertanian Republik Indonesia



Hkti_org



HKTI



HKTI Official



HKTI Official

Makanan Ini Nikmat, Tapi Hati-hati

Konsumsi makanan masyarakat Indonesia terbilang sangat beragam. Mungkin sebanyak keragaman budaya nusantara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk beberapa makanan, meski rasanya nikmat, masyarakat perlu juga mengetahui efek dan cara mengolahnya. Berikut ini Tabloid Sinar Tani ungkap dua jenis makanan yakni kriuk kol goreng dan ceker ayam, seperti dikutip dari IPB.ac.id.

Resiko di Balik Konsumsi **Kol Goreng**

Siapa yang tidak suka dengan sensasi kriuk kol goreng yang renyah? Siapa sangka, hidangan pendamping setia pecel lele ini, ternyata menyimpan bahaya kesehatan yang jarang disadari. Sayuran dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Namun, metode pengolahan sayur yang tidak tepat, seperti digoreng, kandungan gizinya bisa berkurang.

Dr Zuraidah Nasution, dosen Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University mengatakan, proses menggoreng dapat merusak kandungan zat gizi mikro pada sayuran, terutama vitamin yang larut dalam air. "Cara terbaik mengolah sayuran adalah dengan menggunakan prinsip pemaparan panas yang minimal dan penggunaan air yang tidak berlebih, seperti ditumis atau dikukus," katanya dalam tayangan di kanal YouTube IPB TV.

Menggoreng sayuran, terutama dengan teknik *deep frying*, menyebabkan air dalam sayuran menguap. Hal ini menciptakan rongga yang kemudian terisi oleh minyak goreng, sehingga menambah asupan lemak



dan kalori ke dalam tubuh. "Tanpa disadari, kita menambahkan lemak ekstra ke tubuh hanya karena ingin mendapatkan tekstur renyah dari sayur yang digoreng," tambah Dr Zuraidah.

Selain meningkatkan kandungan lemak, menurutnya, proses penggorengan dengan suhu tinggi juga dapat memicu oksidasi lemak dalam minyak goreng. Oksidasi ini menghasilkan senyawa berbahaya, termasuk senyawa karsinogenik yang berpotensi meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

Meskipun kol goreng sebagai pelengkap pecel lele terasa nikmat dan menambah selera makan, perlu

diingat bahwa sayuran sebaiknya diolah dengan cara yang lebih sehat. Sayur tetap dapat memiliki tekstur renyah tanpa harus digoreng, yakni dengan cara mengukus atau menumis dengan waktu singkat dan sedikit air.

"Sayur yang digoreng memang enak. Namun, akan jauh lebih baik dan menyehatkan bila kita mengolahnya dengan teknik yang mempertahankan nilai gizinya," pesan Dr Zuraidah. Dengan memilih metode memasak yang tepat, masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat optimal dari sayuran tanpa harus khawatir kehilangan gizi atau menambah risiko Kesehatan. **Yul**

Kaya Kolagen, Jangan Salah Mengolah Ceker Ayam

Ceker ayam sering dikonsumsi sebagian masyarakat sebagai sumber kolagen alami. Namun, benarkah bagian tubuh ayam ini benar-benar kaya akan kolagen? Bagaimana cara mengolah yang baik?

Prof Ono Suparno, dosen dan peneliti dari Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), IPB University membenarkan, ceker ayam mengandung kolagen dalam jumlah tinggi. Sekitar 70 persen dari total kandungan protein dalam ceker ayam adalah kolagen.

"Kolagen adalah protein struktural penting yang berperan dalam menjaga kekuatan, elastisitas,

dan kepadatan kulit, tulang, tendon, otot, serta ligamen," ujarnya. Selain kolagen, ceker ayam juga mengandung nutrisi lain seperti protein, kalsium, fosfor, vitamin A, folat, magnesium, dan vitamin E. Nutrisi-nutrisi tersebut ikut mendukung manfaat kesehatan dari konsumsi ceker ayam.

Meski demikian, Prof Ono mengingatkan pentingnya mengonsumsi ceker ayam secara seimbang. Karena itu, ia menyarankan agar konsumsi ceker ayam tetap diimbangi dengan sumber gizi lain. Sebaiknya diolah dengan cara sehat seperti direbus menjadi sup kaldu, agar kandungan kolagen tetap terjaga dan lebih mudah diserap tubuh.

Selain ceker ayam, menurutnya, ada sumber kolagen alami lain yang murah dan mudah diperoleh. Misalnya, kaldu tulang dari ayam, sapi, atau ikan, kulit dan kepala ikan, putih telur, serta bagian ayam lain seperti leher dan tulang rawan.

Resiko Ceker Ayam

Namun, ia juga mengingatkan, konsumsi ceker ayam secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Beberapa risiko yang disebutkan antara lain peningkatan kadar kolesterol, kandungan lemak jenuh dan lemak trans jika digoreng.

Selain itu, karena ceker ayam berasal dari bagian kaki yang sering bersentuhan langsung dengan kotoran. Dengan demikian, ada risiko



kontaminasi bakteri atau zat berbahaya jika tidak dibersihkan dengan baik, serta potensi gangguan hormonal.

Ia juga menyebutkan bahwa kolagen dari ceker ayam memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam bentuk yang lebih efektif dan ekonomis, seperti olahan kolagen tripeptida. Untuk itu, Ono menyarankan, masyarakat untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan, baik hewani maupun nabati, yang kaya kolagen atau dapat merangsang produksinya secara alami. **Yul**



TABLOID
SinarTani

TABLOID
SINARTANI.COM

Selamat Tahun Baru Islam

1 Muharram 1447 H



www.tabloidsinartani.com



tabloidsinartani



tabloidsinartani.com



@sinartaniST



SINTA TV



SINTA TV

Komersialisasi E-PAPER SinarTani

TABLOID
SinarTani

Tabloid
sinartani.com

SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com

tabloidsinartani.com

tabloidsinartani.com

@SinarTaniST

tabloidsinartani

SINTA TV

Peringatan Hari Susu di Car Free Day Jakarta

Ada yang berbeda pada kegiatan Car Free Day pada 15 Juni lalu. Bukan hanya sekadar ajang olah raga dan hari bebas polusi kendaraan bermotor, ratusan peserta berkumpul merayakan Hari Susu Nasional 2025 di sepanjang 1,1 kilometer antara Bundaran HI hingga Taman Budaya Dukuh Atas.

Bertemakan "Penuhi Gizi melalui Konsumsi Susu" dan berslogan "Susu untuk Negeri: Segelas Susu untuk Indonesia yang Lebih Sehat" Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan hadir membuka kegiatan menyampaikan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu program pokok Presiden RI Prabowo Subianto.

Memperingati Hari Susu Nusantara 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama sejumlah kementerian, pelaku industri, koperasi susu, dan pemerintah daerah menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukatif dan sosial guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu.

Peringatan tahun ini menyoroti

pentingnya peran susu dalam membangun generasi emas Indonesia, mencegah stunting pada anak-anak, serta mendukung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan pemerintah.

"Perayaan Hari Susu Nusantara bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momentum penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap gizi dan memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Widiastuti mengakui, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain di Asia. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan kampanye yang lebih interaktif dan inklusif.



Selain kegiatan jalan santai dan pameran produk, agenda juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenko Pangan dan PT Pertamina (Persero). Kerja sama ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung ketahanan pangan.

"Kerja sama dengan Pertamina menjadi salah satu bentuk sinergi lintas sektor untuk mendukung program pangan nasional, termasuk penguatan industri susu dalam negeri," ujarnya.

Tidak hanya berlangsung di satu hari, rangkaian Hari Susu Nusantara tahun ini telah diawali dengan seminar nasional di Institut Pertanian Bogor (IPB), pada Senin (2/6).

Seminar tersebut ditujukan untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, membahas nilai gizi susu serta pentingnya peran peternakan sapi perah dalam mendukung kesehatan masyarakat.

"Melalui seminar, kami ingin memperluas pemahaman generasi muda mengenai manfaat susu sebagai produk peternakan strategis. Edukasi harus dimulai sejak di bangku kuliah," tegas Widiastuti.

Hari Susu Nusantara sendiri telah dirayakan sejak tahun 2009, bersamaan dengan Hari Susu Dunia yang jatuh pada 1 Juni. Tahun ini, Jakarta dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki nilai historis dalam perkembangan budaya minum susu di Indonesia. **Herman**

East JakFest 2025, Momentum Kolaborasi Urban Farming Jakarta Timur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta tahun ini akan jatuh pada 22 Juni 2025.

Memperingati momen tersebut, Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai agenda kegiatan yang tersebar di lima wilayah kota administratif serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Rangkaian kegiatan berlangsung sejak April hingga Juli 2025.

Sebagai salah satu kota administratif, Kotip Jakarta Timur punya acara yang cukup menarik. Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta menyelenggarakan East JakFest 2025 di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) Jakarta Timur pada Selasa (10/6).

Kegiatan tersebut diresmikan langsung Walikota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin. Mengusung tema Kolaborasi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat jejaring antar

pelaku pertanian, peternakan, dan perikanan serta memperluas akses edukasi kepada masyarakat.

Munjirin mengapresiasi kegiatan kolaborasi tersebut. Dirinya bahkan ingin membentuk wadah untuk kegiatan pemasaran produk secara mingguan, Sunday Market, atau Saturday Market. Dalam kegiatan tersebut nantinya berkumpul semua penghasil pertanian, peternakan, perikanan dari Jakarta Timur.

"Kita kemas dan buat agenda rutin setiap bulan sekali. Jakarta Timur tidak boleh kalah dari wilayah lain, karena kita paling luas dan masih banyak sekali Lokasi-lokasi yang bisa ditanami. Saya ingin Jakarta Timur menjadi Kota Agriculture," ungkapnya.

Acara yang menyedot lebih dari 700 pengunjung ini menampilkan talkshow, Bimtek, Sterilisasi gratis hewan kucing, pembagian bibit gratis, dan pameran produk UMKM. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat jejaring antar pelaku pertanian, peternakan, dan perikanan serta memperluas akses edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas



KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyoroti status Jakarta yang telah Bebas Rabies sejak tahun 2004. "Target kami tahun ini ada 21.000 ekor kucing yang di sterilisasi di Jakarta, 2000 ekor di antaranya di Jakarta Timur," katanya.

East Jakfest menampilkan talkshow *Urban Farming* menghadirkan narasumber para ahli dan praktisi. Mereka adalah pelaku usaha yang sukses di bidang masing-masing, dengan omzet usaha cukup besar hingga Rp 200 juta/bulan. Hadir juga Widi Mulia "AB Three", artis dan influencer, yang memotivasi warga Jakarta Timur untuk lebih giat ber Urban Farming.

Fetty Dwi Rahmayanti, Peneliti dan Dosen Universitas Borobudur mengatakan, hasil penelitian terungkap banyak warga Jakarta Timur telah memiliki pengetahuan yang efektif tentang Urban Farming. Edukasi kepada praktisi pertanian perkotaan untuk menanam tanaman sesuai ketentuan.

Diantaranya, kondisi geografis Lokasi, membuat kalender tanam sesuai musim, menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan dan daur ulang alat dan bahan pertanian perlu ditingkatkan, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. **Indri/Yul**



Tangan Dingin Made Indra, Buah jadi Beku

Kecintaan terhadap dunia pertanian telah mengantarkan Made Indra Dananjaya menjadi salah satu pelaku usaha muda paling berpengaruh dalam industri buah beku Indonesia. Lulusan Agronomi dan Hortikultura IPB University ini mengubah keprihatinan atas buah hasil panen yang terbuang sia-sia menjadi peluang bisnis yang berdampak luas bagi petani lokal dan industri pangan.

Awal mula lahirnya Bali Food Industry pada 2020 berasal dari sebuah keprihatinan. Made Indra sering menyaksikan buah-buahan lokal yang tak terserap pasar akhirnya membusuk tanpa sempat dikonsumsi. Bersama tim kecilnya, ia memulai usaha dari sebuah garasi di Denpasar. Fokus utama perusahaannya adalah membekukan buah segar langsung dari petani agar tahan lama dan bernilai ekonomi tinggi.

Dengan slogan "Buah Lokal Harus Terkenal", Bali Food Industry mengemas buah dalam bentuk beku maupun produk turunan seperti air lemon siap konsumsi. Pasar pun merespons positif, membuat perusahaannya kewalahan memenu-

hi permintaan dari berbagai daerah seperti Bali, Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara.

Kini, Bali Food Industry bermitra dengan lebih dari 200 petani di berbagai daerah Indonesia. Setiap bulan, perusahaan mampu menyerap lebih dari 100 ton buah, menjalankan proses produksi dengan standar mutu tinggi, serta telah mengantongi izin edar BPOM dan PSAT.

Pada 22 Februari 2025, bertepatan dengan perayaan Tumpek Landep, Bali Food Industry meresmikan gedung operasional baru seluas 15 are di Denpasar Timur. Fasilitas ini dilengkapi ruang penerimaan barang, area bahan baku, ruang kemasan, dan ruang produksi dengan freezer bersuhu minus 40 derajat Celsius, sehingga memungkinkan buah beku bertahan hingga satu tahun tanpa

kehilangan rasa dan warna.

Teknologi ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi. Gedung baru ini bukan hanya simbol pertumbuhan bisnis, melainkan juga bentuk nyata kontribusi terhadap sektor pertanian dan pariwisata Bali.

Proses pemelaspasan dipimpin Ida Rsi Bujangga dari Sekar Taji, menandai dimulainya babak baru perusahaan yang siap melayani lebih banyak petani dan konsumen. Selain fokus pada bisnis, Made Indra juga aktif membina kelompok tani muda, memberi pelatihan manajemen kebun dan pemasaran hasil tani.

Ia kerap menjadi pembicara di forum pertanian nasional serta terlibat dalam berbagai program CSR, seperti pemberdayaan petani singkong di wilayah terpencil.

Kemampuan berbahasa Inggris dan Spanyol memudahkannya membangun komunikasi lintas negara, membuka peluang kolaborasi global dalam memperkenalkan buah lokal Indonesia ke dunia.

Perjalanan Made Indra menjadi refleksi nyata bahwa ketekunan, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama dapat menciptakan perubahan besar. Dari garasi kecil hingga pusat distribusi buah nasional, langkahnya membuktikan bahwa pertanian modern bisa menjadi lahan pengabdian dan peluang bisnis sekaligus.

Lewat tangan dinginnya, pertanian Indonesia tidak lagi identik dengan keterbelakangan, melainkan dengan masa depan yang segar, cerah, dan penuh harapan.

Sumber alumniipbpedia.com/Yul



**PRICE LIST
BERLANGGANAN**

SINAR TANI CETAK

RP. 16.000 | RP 64.000/BLN
RP 768.000/THN

Per Edisi
Minimum Pembelian

SINAR TANI EPAPER

Rp. 72.000/ Thn

CONTACT

081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)




Nama :

Alamat :

Nomor Whatsapp :

Email :

Jabatan :

No rek : 127.0096.016.587

Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

 sinartani.co.id
 tablroidsinarhani.com
 @SinarTaniST
 tablroidsinarhani
 SINTA TV
 SINTA TV